



Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
Provinsi Jawa Tengah

NASKAH INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA (IPP)

PROVINSI JAWA TENGAH

2025





KATA PENGANTAR

Pembangunan kepemudaan merupakan agenda strategis yang membutuhkan landasan regulasi yang kuat, mekanisme pengukuran yang jelas, serta tata kelola yang terkoordinasi di seluruh tingkatan pemerintahan. Penegasan mengenai pentingnya pembangunan pemuda semakin mengemuka seiring dengan ditetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Melalui regulasi tersebut, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) secara resmi diakomodasi sebagai indikator tujuan pembangunan bidang kepemudaan, sehingga pemantauan capaian pembangunan pemuda memiliki rujukan yang baku dan terstandar.

Penetapan IPP sebagai indikator kinerja utama mendorong terwujudnya harmoni kebijakan dan sinergi lintas tingkatan pemerintahan, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Dengan demikian, arah pembangunan pemuda tidak lagi disusun secara intuitif, tetapi berlandaskan pada data kuantitatif dan analisis berbasis bukti (*evidence-based policy*). Upaya ini sejalan dengan kebutuhan nasional untuk memastikan bahwa peran, kapasitas, dan kualitas hidup pemuda dapat berkembang dalam kerangka pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.

Sebagai bagian dari proses penyempurnaan instrumen IPP, pada Mei 2025 Kementerian Pemuda dan Olahraga meluncurkan Panduan Teknis Indeks Pembangunan Pemuda dalam Perumusan Kebijakan Berbasis Bukti. Sebagai tindak lanjut dari pemutakhiran tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata telah menyusun Naskah Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025. Dokumen ini menjadi representasi komprehensif mengenai kondisi aktual pemuda Jawa



Tengah berdasarkan formulasi terbaru hasil peninjauan ulang IPP yang meliputi lima domain dan enam belas indikator utama.

Hasil pengukuran menunjukkan adanya keragaman performa antarindikator yang mencerminkan tantangan multidimensional dalam pembangunan pemuda. Analisis kuadran menghasilkan pengelompokan indikator yang memberikan gambaran lebih tajam mengenai capaian, kekuatan, serta aspek-aspek yang memerlukan intervensi prioritas.

Secara umum, Jawa Tengah mencatat capaian yang relatif tinggi pada indikator-indikator terkait penguasaan keterampilan dasar digital, partisipasi sosial masyarakat, serta sejumlah indikator pendidikan dan inklusivitas gender. Pada Kuadran I (*High Achievement/High Priority*), indikator seperti persentase pemuda dengan keterampilan TIK mencapai 98,55%, menunjukkan kesiapan digital yang sangat kuat. Begitu pula partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial masyarakat yang berada pada angka 76,77%, mencerminkan tingginya modal sosial dan keterlibatan pemuda dalam aktivitas kemasyarakatan. Meskipun demikian, indikator-indikator ini tetap memerlukan perhatian strategis agar tidak mengalami stagnasi di tengah dinamika global yang cepat berubah.

Pada Kuadran II (*High Achievement/Low Priority*), indikator seperti tingkat pendidikan pemuda, prevalensi perkawinan anak, serta proporsi pekerja tidak penuh menunjukkan performa yang relatif stabil. Persentase pemuda berijazah SMA/ sederajat atau lebih yang telah mencapai 43,82, serta skor perkawinan anak sebesar 77,01, mengindikasikan pencapaian yang cukup baik dan perlu dipertahankan melalui mekanisme monitoring berkelanjutan.

Di sisi lain, Kuadran III (*Low Achievement/High Priority*) menampilkan tantangan yang lebih mendasar. Rendahnya persentase pemuda yang menerima pelatihan bersertifikat (17,59%) menunjukkan adanya kesenjangan keterampilan yang dapat menghambat daya saing pemuda dalam dunia kerja. Demikian pula rendahnya tingkat partisipasi kerja pemuda penyandang disabilitas (23,16%), tingginya proporsi pemuda NEET (21,37%), meningkatnya angka kesakitan pemuda (8,48%), dan tingginya angka perokok pemuda (27,41%) menegaskan kebutuhan intervensi kebijakan yang bersifat mendesak, komprehensif, dan lintas sektor.



Sementara itu, indikator dalam Kuadran IV (*Low Achievement/Low Priority*) — seperti partisipasi pemuda dalam organisasi (9,7%) dan kebiasaan berolahraga (27,2%) — memerlukan penguatan bertahap melalui penyediaan ruang partisipatif, fasilitas publik yang memadai, dan kampanye kesehatan jangka panjang.

Melalui gambaran hasil pengukuran ini, diharapkan pemerintah daerah, pemangku kepentingan lintas sektor, organisasi kepemudaan, lembaga pendidikan, dan mitra pembangunan dapat memperoleh pemahaman yang lebih jernih mengenai profil pembangunan pemuda Jawa Tengah. Dokumen ini bukan hanya berfungsi sebagai laporan statistik, tetapi juga sebagai dasar refleksi dan strategi untuk mengarahkan kebijakan pembangunan pemuda secara lebih terukur, partisipatif, dan adaptif.

Akhir kata, kami berharap dokumen ini menjadi kontribusi penting bagi upaya bersama dalam mendorong peningkatan kualitas generasi muda Jawa Tengah sekaligus menguatkan fondasi pembangunan daerah dalam jangka panjang. Dengan pemanfaatan IPP yang tepat dan berkelanjutan, pembangunan pemuda diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Semarang, November 2025
Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Provinsi Jawa Tengah


Muhamad Masrofi, S.Sos, M.Si,
NIP. 196805171989081002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	2
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	7
1.2.1 Maksud	7
1.2.2 Tujuan	7
1.2.3 Sasaran	7
1.3 DASAR HUKUM.....	7
1.4 RUANG LINGKUP.....	8
1.4.1 Lingkup Wilayah	8
1.4.2 Lingkup Substansi	8
1.5 SISTEMATIKA.....	8
2 PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN.....	10
2.1 PEMUDA DAN KEPEMUDAAN	12
2.2 KONSEP DAN RUANG LINGKUP PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN.....	13
2.3 TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN	16
2.4 PENGUKURAN CAPAIAN PEMBANGUNAN PEMUDA.....	19
3 METODOLOGI PERHITUNGAN IPP PENINJAUAN ULANG DAN DINAMIKA KEPEMUDAAN JAWA TENGAH	26
3.1 METODOLOGI PERHITUNGAN IPP	29
3.1.1 Pendekatan	29
3.1.2 Metodologi Perhitungan IPP Provinsi Jawa Tengah 2025.....	30
3.2 DINAMIKA KEPEMUDAAN JAWA TENGAH.....	40



3.2.1	Aspek Geografis	40
3.2.2	Aspek Demografi	44
3.2.3	Isu Strategis Kepemudaan Jawa Tengah	48
4	CAPAIAN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA (IPP) PROVINSI JAWA TENGAH 2025	53
4.1	DOMAIN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	54
4.2	DOMAIN KESEHATAN	57
4.3	DOMAIN KETENAGAKERJAAN LAYAK	61
4.4	DOMAIN PARTISIPASI DAN KEPEMIMPINAN	64
4.5	DOMAIN INKLUSIVITAS DAN KESETARAAN GENDER	67
5	ARAH KEBIJAKAN BERDASARKAN CAPAIAN IPP	71
5.1	CAPAIAN IPP SEBAGAI DASAR MONEV TIM RAD	73
5.2	KUADRAN PRIORITAS CAPAIAN INDIKATOR IPP 2025	81
5.2.1	Kuadran I — <i>High Achievement / High Priority</i>	82
5.2.2	Kuadran II — <i>High Achievement / Low Priority</i>	83
5.2.3	Kuadran III — <i>Low Achievement / High Priority</i> (Prioritas Intervensi Mendesak)	84
5.2.4	Kuadran IV — <i>Low Achievement / Low Priority</i>	85
5.3	MATRIKS ARAH KEBIJAKAN DAN IMPLIKASI	88
6	PENUTUP	91
	DAFTAR PUSTAKA	95



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Domain dan Indikator IPP Hasil Peninjauan Ulang	5
Tabel 3.1 Metodologi Penghitungan IPP Hasil Peninjauan Ulang.....	38
Tabel 3.2 Luas Wilayah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.....	42
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah 2023-2024	45
Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2024.....	47
Tabel 4.1 Ringkasan Domain Pendidikan dan Pelatihan	56
Tabel 4.2 Ringkasan Domain Kesehatan.....	60
Tabel 4.3 Ringkasan Domain Ketenagakerjaan Layak	63
Tabel 4.4 Ringkasan Domain Partisipasi dan Kepemimpinan	66
Tabel 5.1 Nilai IPP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	75
Tabel 5.2 Pembagian Kelas Kategori Capaian IPP.....	76
Tabel 5.3 Indikator Baru dalam IPP 2025 dan Implikasi Pengembangan Pemuda di Jawa Tengah	79
Tabel 5.4 Ringkasan Kuadran Indikator IPP Jawa Tengah	87
Tabel 5.5 Matriks Arah Kebijakan – Intervensi – Implikasi Domain Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah	88
Tabel 5.6 Matriks Arah Kebijakan – Intervensi – Implikasi Domain Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	88
Tabel 5.7 Matriks Arah Kebijakan – Intervensi – Implikasi Domain Ketenagakerjaan Layak Provinsi Jawa Tengah	89
Tabel 5.8 Matriks Arah Kebijakan – Intervensi – Implikasi Domain Partisipasi dan Kepemimpinan Provinsi Jawa Tengah	89
Tabel 5.9 Matriks Arah Kebijakan – Intervensi – Implikasi Domain Inklusivitas dan Kesetaraan Gender Provinsi Jawa Tengah	90



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Arsitektur Pembangunan Kepemudaan	17
Gambar 2.2 Kerangka Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia 2017 – Mei 2025	21
Gambar 2.3 Kerangka Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia Hasil Peninjauan Ulang 2025.....	24
Gambar 3.1 Domain dan Indikator IPP 2017 – Mei 2025.....	33
Gambar 3.2 Alur Proses Perhitungan IPP 2017 – Mei 2025	34
Gambar 3.3 Domain dan Indikator IPP Hasil Peninjauan Ulang 2025.....	36
Gambar 3.4 Peta Administrasi Provinsi Jawa Tengah.....	41
Gambar 3.5 Persentase Luas Wilayah Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah.....	44
Gambar 3.6 Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah, 2024.....	46
Gambar 3.7 Kerangka Pikir Konseptual dan Pemetaan Persoalan Pembangunan Pemuda	49
Gambar 5.1 Kuadran Klasifikasi Capaian Indikator IPP	87



1 PENDAHULUAN





1.1 LATAR BELAKANG

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, pemuda adalah warga negara yang berusia 16-30 tahun. Pada tahun 2024, pemuda mencakup mereka yang lahir antara tahun 1994 hingga 2008. Dengan potensi yang begitu besar, pemerintah menempatkan isu kepemudaan sebagai salah satu fokus utama dalam Pembangunan Nasional. Hal ini tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Melalui perencanaan ini, pemerintah berupaya mengintegrasikan isu-isu strategis terkait kepemudaan ke dalam kebijakan nasional, bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang berkualitas, mandiri, dan kompetitif di tingkat global.

Setidaknya sejak 2019, IPP digunakan sebagai indikator Kepemudaan oleh Kemenpora, Sebagai salah satu upaya dalam mendukung perwujudan pembangunan nasional melalui urusan kepemudaan, maka pengukuran status pembangunan pemuda dengan menggunakan suatu indeks komposit yang disebut Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). IPP diukur 3 lapisan yaitu (1) pembangunan individu; (2) penghidupan dan kesejahteraan; dan (3) partisipasi dalam berbagai kehidupan. Ketiga pilar IPP ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Pemuda yang memiliki kualitas pendidikan dan kesehatan yang baik, serta memiliki peluang ekonomi yang luas, akan lebih mampu untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa. Sebaliknya, pemuda yang aktif dalam masyarakat dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, akan lebih termotivasi untuk meningkatkan kualitas diri dan kesejahteraan hidupnya.

Oleh karenanya pembangunan kepemudaan merupakan salah satu agenda strategis dalam pembangunan nasional. Generasi muda tidak hanya dipandang sebagai penerus kepemimpinan bangsa, tetapi juga sebagai kekuatan potensial dalam pembangunan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Oleh karena itu, diperlukan suatu instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur, memantau, dan mengevaluasi capaian pembangunan pemuda secara komprehensif, terukur, dan terarah. Salah satu instrumen tersebut adalah Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), yang dikembangkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora).



Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan suatu alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk menilai capaian pembangunan pemuda dalam lima domain utama, yaitu: (1) Pendidikan, (2) Kesehatan dan kesejahteraan, (3) Kesempatan dan partisipasi kerja, (4) Partisipasi dan kepemimpinan, dan (5) Gender dan diskriminasi.

Kelima domain ini mencerminkan aspek-aspek mendasar yang mempengaruhi kualitas hidup dan produktivitas pemuda Indonesia. IPP disusun secara berkala dengan pendekatan statistik dan metodologi yang konsisten, sehingga dapat digunakan sebagai instrumen pembandingan antar wilayah dan antar waktu.

Sebagai sebuah indeks komposit, IPP berfungsi tidak hanya sebagai cermin dari kondisi objektif pemuda, tetapi juga sebagai alat bantu bagi perumusan kebijakan pembangunan kepemudaan yang *evidence based*. Penggunaan IPP memungkinkan pemerintah di semua level untuk:

1. Mengidentifikasi kesenjangan pembangunan pemuda antar wilayah, baik antar provinsi maupun antar kabupaten/kota.
2. Memonitor capaian program dan kebijakan kepemudaan secara kuantitatif.
3. Mengevaluasi efektivitas intervensi kebijakan yang telah dilakukan terhadap populasi muda.
4. Merumuskan prioritas pembangunan berdasarkan domain yang paling tertinggal.

Sebagai contoh, apabila suatu daerah memiliki IPP yang rendah pada domain "kesempatan kerja", maka pemerintah daerah dapat menyusun program pelatihan keterampilan atau inkubasi wirausaha bagi pemuda. Sebaliknya, jika domain "partisipasi dan kepemimpinan" rendah, maka perlu dikembangkan program pemberdayaan organisasi kepemudaan dan peningkatan kapasitas politik pemuda.

Di tingkat provinsi, khususnya di Jawa Tengah, IPP menjadi indikator makro untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan daerah yang menyangkut pemuda. Pemerintah provinsi Jawa Tengah menggunakan IPP sebagai indikator pengukuran dalam Menyusun target indikator dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2022-2029.



Sebagai lembaga antara, pemerintah provinsi juga berperan dalam penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat kabupaten/kota agar mampu mengelola data IPP secara lebih baik dan menggunakannya dalam perencanaan pembangunan daerah. Sama seperti di level provinsi, di tingkat kabupaten/kota, IPP dapat digunakan sebagai alat bantu perencanaan berbasis data yang bersifat lebih kontekstual dan operasional. Pemerintah kabupaten/kota dapat:

1. Menyusun profil kepemudaan lokal berdasarkan capaian IPP dan domain penyusunnya.
2. Mengidentifikasi kelompok pemuda rentan (misalnya pemuda tidak bekerja, tidak sekolah, dan tidak mengikuti pelatihan—NEET).
3. Mengembangkan program-program spesifik berbasis kebutuhan lokal, seperti pelatihan vokasi, layanan konseling kesehatan remaja, atau penguatan organisasi pemuda tingkat desa dan kelurahan.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dampak program pembangunan pemuda terhadap capaian IPP dalam jangka menengah.

IPP juga penting sebagai alat komunikasi kebijakan, yang dapat digunakan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk berinteraksi dengan stakeholder lokal seperti DPRD, organisasi kepemudaan (OKP), lembaga pendidikan, dan sektor swasta dalam merancang kolaborasi pembangunan pemuda.

Dalam era pembangunan yang semakin kompleks dan dinamis, Indeks Pembangunan Pemuda menjadi instrumen penting dalam menciptakan tata kelola pembangunan pemuda yang transparan, partisipatif, dan berbasis bukti. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu menjadikan IPP bukan hanya sebagai angka statistik, melainkan sebagai peta jalan strategis untuk memastikan bahwa setiap pemuda memiliki akses yang adil terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesempatan untuk berkontribusi secara aktif bagi masyarakat dan negara.

Inmendagri No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025–2029 juga telah menetapkan Indikator IPP sebagai Indikator Tujuan Bidang Kepemudaan. Hal ini tentu memperkuat Upaya harmonisasi dan sinergitas di setiap tingkatan Pemerintahan, terutama pada tingkatan Pemerintah Kabupaten/Kota bahwa pengukuran pengembangan dan Pembangunan Pemuda didasarkan atas indikator kuantitatif IPP.



Selanjutnya pada Mei 2025, Kemenpora meluncurkan peninjauan ulang terhadap IPP, Panduan Teknis Indeks Pembangunan Pemuda dalam Perumusan Kebijakan Berbasis Bukti yang didimutakhirkan dengan tujuan agar pemangku kepentingan dapat memahami agenda pembangunan pemuda secara umum dan pemanfaatan IPP sebagai instrumen dalam perumusan kebijakan pembangunan pemuda. Saat ini, masih banyak pemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah, yang tidak memahami cara memanfaatkan IPP guna merumuskan kebijakan pemuda. Walaupun telah ada peningkatan di beberapa aspek, tantangan dalam pembangunan pemuda masih memerlukan perhatian khusus, terutama dalam hal perencanaan strategis jangka panjang.

Adapun 5 Domain dan 16 Indikator IPP hasil peninjauan ulang Adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Domain dan Indikator IPP Hasil Peninjauan Ulang

Domain	Indikator	Definisi
Pendidikan dan Pelatihan	Persentase pemuda mendapatkan pelatihan bersertifikat	Persentase pemuda berusia 16–30 tahun yang pernah mengikuti pelatihan / kursus/training dan memperoleh sertifikat
	Persentase pemuda yang memiliki ijazah SMA/ sederajat atau lebih tinggi	Persentase pemuda berusia 19–30 tahun yang menamatkan pendidikan (ijazah tertinggi) minimal jenjang SMA/ sederajat (termasuk pendidikan tinggi)
	Persentase pemuda dengan keterampilan TIK	Persentase pemuda berusia 16–30 tahun yang menggunakan ponsel, atau komputer, atau mengakses internet dalam tiga bulan terakhir
Kesehatan	Angka kesakitan pemuda	Proporsi pemuda berusia 16–30 tahun yang memiliki keluhan kesehatan yang mengganggu kegiatan sehari-hari dalam sebulan terakhir terhadap proporsi populasi pemuda
	Persentase pemuda yang merokok	Persentase pemuda usia 16–30 tahun yang merokok tembakau atau rokok elektrik dalam sebulan terakhir
	Persentase pemuda yang berolahraga	Persentase pemuda yang melakukan olah raga sedikitnya sehari dalam seminggu terakhir terhadap seluruh pemuda
	Persentase remaja perempuan yang sedang hamil	Persentase remaja perempuan usia 15–18 tahun yang sedang hamil terhadap seluruh remaja perempuan usia 15–18 tahun yang telah/pernah kawin
Ketenagakerjaan Layak	Persentase pemuda NEET	Proporsi pemuda usia 16–30 tahun yang tidak sedang bersekolah, bekerja, dan



Domain	Indikator	Definisi
		mengikuti pelatihan terhadap seluruh populasi pemuda
	Persentase pemuda pekerja tidak penuh	Persentase pemuda yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu dari seluruh populasi pemuda bekerja
	Rasio kewirausahaan pemuda	Proporsi pemuda bekerja dibantu buruh tetap/dibayar dibagi dengan populasi angkatan kerja pemuda dikalikan 100
Partisipasi dan Kepemimpinan	Persentase pemuda mengikuti kegiatan sosmas	Proporsi pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam tiga bulan terakhir terhadap populasi pemuda seluruhnya
	Persentase pemuda aktif mengikuti organisasi	Proporsi pemuda yang ikut serta aktif dalam kegiatan organisasi selain di tempat kerja/sekolah terhadap populasi pemuda seluruhnya
	Persentase pemuda yang menduduki posisi manajerial	Proporsi pemuda yang bekerja menduduki posisi manajerial terhadap populasi pemuda bekerja
Inklusivitas dan Kesetaraan Gender	Rasio TPAK pemuda perempuan terhadap laki-laki	Proporsi tingkat partisipasi angkatan kerja pemuda perempuan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja pemuda laki-laki dikali 100
	Persentase pemuda penyandang disabilitas yang bekerja	Proporsi pemuda penyandang disabilitas yang bekerja terhadap populasi seluruh pemuda penyandang disabilitas
	Persentase perkawinan anak	Proporsi perempuan pernah kawin usia 20–24 tahun yang perkawinan pertamanya di bawah usia 18 tahun terhadap proporsi perempuan pernah kawin usia 20–24 tahun

Sebagai tindak lanjut dari upaya mengukur pembangunan pemuda, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Disporapar menyusun Dokumen Naskah Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 yang sepenuhnya didasarkan pada formulasi hasil peninjauan kembali. Dokumen ini berfungsi sebagai instrumen yang menggambarkan kondisi pembangunan pemuda di Provinsi Jawa Tengah, yang diukur melalui lima domain pengungkit, yaitu:

1. Pendidikan dan Pelatihan
2. Kesehatan
3. Ketenagakerjaan Layak



4. Partisipasi dan Kepemimpinan
5. Inklusivitas dan Kesetaraan Gender

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

1.2.1 Maksud

Ditinjau dari penjabaran latar belakang di atas, maksud dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah terumuskannya Naskah Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Jawa Tengah 2025 berdasarkan formulasi IPP Peninjauan ulang tahun 2025.

1.2.2 Tujuan

Tujuan dari pekerjaan ini adalah memberikan analisis yang mendalam mengenai pembangunan pemuda yang didasarkan pada hasil perhitungan nilai IPP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 berdasarkan formulasi IPP Peninjauan ulang tahun 2025.

1.2.3 Sasaran

Sasaran dari diselenggarakannya kegiatan penyusunan Naskah Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Jawa Tengah 2025 ini adalah tersusunya naskah yang sistematis dan informatif berdasarkan komponen sebagai berikut:

1. Pendidikan dan Pelatihan
2. Kesehatan
3. Ketenagakerjaan Layak
4. Partisipasi dan Kepemimpinan
5. Inklusivitas dan Kesetaraan Gender

1.3 DASAR HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Naskah Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 mencakup:

1. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



3. Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan
5. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan
6. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023-2026

1.4 RUANG LINGKUP

1.4.1 Lingkup Wilayah

Secara wilayah, ruang lingkup wilayah adalah wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah.

1.4.2 Lingkup Substansi

Ruang lingkup substansi dari penyusunan Naskah IPP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan analisis terhadap hasil perhitungan 5 domain indeks pembangunan pemuda serta melakukan perhitungan nilai IPP Jawa Tengah 2025.
2. Menyusun kebijakan dalam penguatan pembangunan pemuda Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk *Policy Paper*.

1.5 SISTEMATIKA

Sistematika pelaporan pada dokumen Naskah Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Jawa Tengah 2025 adalah sebagai berikut:

BAB 1 - PENDAHULUAN

Bagian ini mencakup pengantar laporan yang menjelaskan latar belakang pelaksanaan pekerjaan, maksud dan tujuan penyusunan pekerjaan, cakupan kegiatan, serta susunan pelaporan.

BAB 2 - PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN



Bagian ini berisi pemahaman terkait kepemudaan, keterlibatan pemuda dalam pembangunan, gambaran deskripsi indikator penyusun pembangunan pemuda, serta isu strategis kepemudaan Provinsi Jawa Tengah.

BAB 3 - METODOLOGI PERHITUNGAN IPP PENINJAUAN ULANG DAN DINAMIKA KEPEMUDAAN JAWA TENGAH

Bagian ini berisi mengenai menjabarkan metodologi yang digunakan dalam perhitungan capaian nilai IPP Jawa Tengah Tahun 2025 serta gambaran umum wilayah Jawa Tengah.

BAB 4 - CAPAIAN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA (IPP) PROVINSI JAWA TENGAH 2025

Bagian ini berisi mengenai hasil pengukuran indikator dan domain pengungkit IPP Provinsi Jawa Tengah 2025 beserta pembahasannya.

BAB 5 - PENUTUP

Bab ini menyajikan rumusan kesimpulan yang didasarkan pada hasil pembahasan serta memberikan usulan rekomendasi terkait penguatan pembangunan pemuda di Jawa Tengah.



2PEMBANGUNAN





KEPEMUDAAN

Konsep pemuda umumnya dipahami sebagai kelompok usia transisi antara masa remaja dan dewasa yang ditandai oleh perkembangan fisik, psikologis, sosial, dan kultural. Pemuda berada pada fase pencarian jati diri, penguatan kapasitas intelektual, dan pembentukan orientasi nilai yang akan memengaruhi peran mereka di masyarakat. Dalam banyak literatur, pemuda dipandang sebagai agen perubahan (*agents of change*) karena memiliki energi, kreativitas, kemampuan beradaptasi, serta potensi untuk menginisiasi inovasi sosial. Oleh karena itu, memahami karakteristik pemuda menjadi langkah penting dalam merumuskan kebijakan yang mampu memberdayakan dan mengoptimalkan kontribusi mereka bagi pembangunan.

Dalam konteks pembangunan, pemuda menempati posisi strategis sebagai penggerak transformasi sosial, ekonomi, dan politik. Teori pembangunan modern menekankan bahwa kualitas sumber daya manusia, termasuk pemuda, merupakan modal utama bagi kemajuan suatu bangsa. Pembangunan tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan kapasitas manusia melalui pendidikan, kesehatan, partisipasi, dan perlindungan sosial. Pemuda, dengan dinamika dan potensi yang dimilikinya, dapat menjadi katalis bagi percepatan pembangunan apabila diberi ruang partisipasi yang memadai serta akses terhadap berbagai peluang peningkatan kompetensi.

Keterlibatan pemuda dalam pembangunan juga dipengaruhi oleh lingkungan kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan mereka. Pembangunan yang berorientasi pemuda mensyaratkan adanya integrasi isu-isu pemuda dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Hal ini mencakup pemberian akses terhadap pendidikan berkualitas, kesempatan kerja yang layak, ruang partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, serta perlindungan dari berbagai risiko sosial. Dengan demikian, pembangunan yang memposisikan pemuda sebagai subjek sekaligus mitra strategis akan mampu mewujudkan masyarakat yang lebih adaptif, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial.



2.1 PEMUDA DAN KEPEMUDAAN

Pemuda sering didefinisikan sebagai kelompok usia yang berada pada fase transisi antara masa kanak-kanak dan dewasa, yang ditandai oleh dinamika perkembangan biologis, kognitif, dan sosial. Menurut (Erikson, 1968), masa pemuda merupakan tahap pencarian identitas yang krusial, di mana individu berusaha membangun pemahaman diri yang stabil. Dalam perspektif sosiologis, pemuda tidak hanya dipandang dari aspek usia, tetapi juga dari posisi sosial mereka sebagai kelompok dengan potensi perubahan besar (Ghasarian dkk., 1995). Oleh sebab itu, pemuda menjadi subjek penting dalam berbagai kajian pembangunan sosial.

Kepemudaan sebagai konsep kebijakan merujuk pada seluruh aspek yang berkaitan dengan kehidupan pemuda, termasuk kebutuhan, permasalahan, potensi, dan peran mereka di masyarakat. UNESCO (2010) menekankan bahwa kepemudaan mencakup pendekatan multidimensi yang melibatkan pendidikan, kesehatan, partisipasi sosial, ekonomi, hingga perlindungan dari risiko sosial. Dengan demikian, kebijakan kepemudaan tidak hanya berfokus pada pengembangan individu, tetapi juga pada penciptaan lingkungan yang kondusif bagi pemuda untuk tumbuh dan berkontribusi.

Pemuda dianggap memiliki energi, kreativitas, dan kemampuan adaptasi yang tinggi, sehingga berpotensi besar menjadi agen perubahan (*agents of change*). Teori gerakan sosial menyebutkan bahwa pemuda sering menjadi motor utama transformasi sosial karena keberanian mereka dalam menentang status quo serta kemampuan untuk mengartikulasikan ide-ide baru (TOURAINE, 1985). Dalam konteks ini, keberadaan ruang partisipatif yang terbuka bagi pemuda menjadi faktor penting dalam mendorong inovasi sosial dan perubahan positif.

Dari perspektif pembangunan, pemuda menjadi salah satu aktor strategis dalam mempercepat kemajuan sosial-ekonomi. *Human Development Theory* yang dikemukakan oleh (Clapp & Sen, 1999) menjelaskan bahwa pembangunan harus berorientasi pada perluasan kapabilitas manusia. Pemuda, dengan potensi intelektual dan produktivitas yang tinggi, memainkan peran krusial dalam peningkatan daya saing suatu wilayah. Ketika pemuda memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, dan pekerjaan layak, mereka dapat



memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Kepemudaan juga berkaitan dengan proses pembentukan kepemimpinan dan partisipasi dalam kehidupan publik. Menurut Checkoway (2011), partisipasi pemuda bukan hanya sebuah hak, tetapi juga sarana untuk membangun kapasitas kewargaan (*civic skills*) yang penting bagi keberlanjutan demokrasi. Keterlibatan pemuda dalam organisasi komunitas, proses perencanaan pembangunan, hingga struktur pemerintahan menjadi indikator penting bagi keberhasilan pembangunan sosial yang inklusif.

Melalui perspektif teoritis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemuda dan kepemudaan memiliki peran fundamental dalam pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang tidak melibatkan pemuda berisiko menciptakan kebijakan yang tidak responsif terhadap realitas sosial dan kebutuhan generasi masa depan. Oleh karena itu, berbagai literatur menegaskan pentingnya pendekatan yang holistik, partisipatif, dan berpihak pada pemuda dalam setiap tahapan pembangunan (United Nation, 2015). Dengan demikian, pemuda harus dipandang bukan sekadar penerima manfaat pembangunan, tetapi sebagai mitra strategis yang mampu memperkuat fondasi sosial, ekonomi, dan politik suatu masyarakat.

2.2 KONSEP DAN RUANG LINGKUP PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Pembangunan kepemudaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda, agar mampu berperan aktif dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara konseptual, pembangunan kepemudaan tidak hanya dimaknai sebagai upaya peningkatan kesejahteraan pemuda, tetapi juga sebagai proses sistematis untuk membentuk karakter, kompetensi, dan kapasitas sosial yang berkelanjutan. Melalui pembangunan kepemudaan, diharapkan tercipta generasi muda yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial yang seimbang, serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan bangsa.



Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menjelaskan bahwa pembangunan kepemudaan adalah proses yang dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan untuk memfasilitasi, memberdayakan, serta mengembangkan potensi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan demikian, pembangunan kepemudaan tidak hanya berfokus pada penguatan kapasitas individu, tetapi juga pada penciptaan lingkungan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang kondusif bagi tumbuhnya partisipasi pemuda secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan kepemudaan bersifat multidimensional dan memerlukan sinergi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, organisasi kepemudaan, serta dunia usaha (Efendi, 2020).

Secara substantif, pembangunan kepemudaan mencakup dua dimensi utama, yaitu dimensi pengembangan dan dimensi pemberdayaan (Kemenpora RI, 2019). **Dimensi pengembangan** menitikberatkan pada peningkatan kualitas dan kapasitas diri pemuda melalui pendidikan, pelatihan, peningkatan keterampilan, serta pembentukan karakter dan moralitas. Tujuan utama dimensi ini adalah membentuk generasi muda yang mandiri, kreatif, dan inovatif. Sementara itu, **dimensi pemberdayaan** berfokus pada peningkatan partisipasi aktif pemuda dalam berbagai bidang sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan. Pemberdayaan dimaksudkan agar pemuda tidak hanya menjadi objek pembangunan, melainkan juga subjek yang turut menentukan arah dan keberlanjutan pembangunan bangsa (Soepardjo, 2018).

Ruang lingkup pembangunan kepemudaan meliputi berbagai aspek kehidupan yang saling berhubungan dan mendukung satu sama lain. Menurut Badan Pusat Statistik (2024), ruang lingkup pembangunan kepemudaan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bidang strategis, yaitu:

1. Aspek pendidikan dan pelatihan, yang bertujuan meningkatkan kompetensi, literasi, dan profesionalisme pemuda agar memiliki daya saing di tingkat nasional maupun global.
2. Aspek kesehatan dan kesejahteraan, yang berorientasi pada pembentukan generasi muda yang sehat secara fisik, mental, dan sosial.



3. Aspek kewirausahaan dan ketenagakerjaan, yang diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi pemuda serta menciptakan lapangan kerja baru melalui inovasi dan wirausaha muda.
4. Aspek partisipasi sosial dan politik, yang mendorong keterlibatan pemuda dalam pengambilan keputusan publik, organisasi sosial, serta kegiatan politik yang konstruktif.
5. Aspek kepemimpinan dan organisasi kepemudaan, yang menekankan pembentukan karakter kepemimpinan, tanggung jawab sosial, dan kemampuan berorganisasi secara demokratis.
6. Aspek kebudayaan dan karakter bangsa, yang bertujuan memperkuat nilai-nilai nasionalisme, kebhinekaan, dan integritas moral sebagai bagian dari identitas kebangsaan.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan kepemudaan menuntut dukungan kelembagaan yang kuat, kebijakan yang konsisten, serta koordinasi antarinstansi yang efektif. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan regulator dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan potensi pemuda, sementara masyarakat, lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, dan dunia usaha berperan sebagai mitra strategis yang memperluas ruang aktualisasi pemuda. Oleh karena itu, pembangunan kepemudaan perlu dilaksanakan secara kolaboratif, partisipatif, dan berkelanjutan untuk menghasilkan generasi muda yang berkarakter, adaptif, dan kompetitif di era global.

Lebih lanjut, pembangunan kepemudaan harus disesuaikan dengan dinamika perubahan global yang semakin kompleks. Globalisasi, kemajuan teknologi informasi, serta transformasi ekonomi digital menuntut pemuda memiliki kemampuan berpikir kritis, komunikasi efektif, kolaborasi, kreativitas, dan literasi digital. Dalam konteks tersebut, pembangunan kepemudaan perlu diarahkan pada penguatan kompetensi abad ke-21 yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat modern. Selain itu, dimensi keberlanjutan (*sustainability*) juga menjadi aspek penting, di mana pemuda harus memiliki kesadaran ekologis, tanggung jawab sosial, serta kepedulian terhadap isu-isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Dengan demikian, pembangunan kepemudaan merupakan proses strategis yang tidak hanya menyiapkan pemuda sebagai penerus bangsa, tetapi juga



sebagai aktor utama dalam proses transformasi sosial, ekonomi, dan politik. Pembangunan kepemudaan yang dirancang secara terencana, inklusif, dan partisipatif akan melahirkan generasi muda yang tangguh, berintegritas, berdaya saing, serta mampu berkontribusi secara signifikan terhadap terwujudnya Indonesia yang maju, berdaulat, dan berkeadilan sosial (Efendi, 2020).

2.3 TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Secara terminologis, kepemudaan mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, pencapaian diri, serta aspirasi pemuda dalam berbagai bidang kehidupan. Konsep ini tidak hanya menyoroti keberadaan pemuda sebagai kelompok usia tertentu, tetapi juga menekankan peran dan kontribusinya dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya bangsa.

Dengan demikian, pembangunan kepemudaan dapat dimaknai sebagai serangkaian upaya yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk memfasilitasi pengembangan seluruh dimensi kehidupan pemuda, baik secara individu maupun kolektif. Tujuan utama dari pembangunan kepemudaan adalah menciptakan generasi muda yang berdaya, berkarakter, mandiri, serta mampu berperan aktif dalam pembangunan nasional dan global.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan pelaksanaan pelayanan kepemudaan melalui berbagai kegiatan yang berorientasi pada peningkatan pemahaman, pemberdayaan, dan pengembangan kapasitas pemuda. Kegiatan ini dapat mencakup pelatihan kepemimpinan, pengembangan kewirausahaan, peningkatan literasi digital dan sosial, serta penguatan semangat kebangsaan dan solidaritas sosial. Pelayanan kepemudaan berfungsi sebagai wadah strategis untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan, semangat inovasi, kemandirian, dan rasa tanggung jawab sosial, sehingga pemuda mampu menjadi agen perubahan (*agents of change*) yang berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 2.1 Arsitektur Pembangunan Kepemudaan

Agar hal tersebut dapat dijalankan, pemerintah daerah membentuk sebuah Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas mengurus urusan kepemudaan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pemerintah daerah menyelenggarakan layanan kepemudaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, dengan memperhatikan karakteristik dan potensi yang dimiliki oleh pemuda di setiap daerah.

Bentuk pelayanan kepemudaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah diuraikan sebagai berikut:

1. **Penyadaran**

Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan. Kegiatan ini berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan yang dilaksanakan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko. Penyadaran diwujudkan melalui:

- a. Pendidikan agama dan akhlak mulia
- b. Pendidikan wawasan kebangsaan



- c. Penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- d. Penumbuhan semangat bela negara
- e. Pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal
- f. Pemahaman kemandirian ekonomi
- g. Penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang

2. Pemberdayaan

Pemberdayaan pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda. Dilakukan melalui:

- a. peningkatan iman dan takwa
- b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi
- c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional
- d. penguatan kemandirian ekonomi pemuda
- e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda
- f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.

3. Pengembangan Kepemimpinan

Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta pergerakan pemuda. Pengembangan kepemimpinan dilaksanakan melalui:

- a. Pendidikan
- b. Pelatihan
- c. Pengaderan
- d. Pembimbingan
- e. Pendampingan
- f. Forum kepemimpinan pemuda

4. Pengembangan Kewirausahaan

Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha



dengan membentuk dan mengembangkan pusat-pusat kewirausahaan.

Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan melalui:

- a. Pelatihan
- b. Pemagangan
- c. Pembimbingan
- d. Pendampingan
- e. Kemitraan
- f. Promosi
- g. Bantuan akses permodalan

5. Pengembangan Kepeloporan

Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah. Pengembangan kepeloporan dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan nasional.

Pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan melalui:

- a. Pelatihan,
- b. Pendampingan, dan/atau
- c. Forum kepemimpinan pemuda

2.4 PENGUKURAN CAPAIAN PEMBANGUNAN PEMUDA

Pada tahun **2015**, pemerintah Indonesia mulai menginisiasi penyusunan **Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)** sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi capaian pembangunan pemuda secara sistematis dan terukur di tingkat nasional maupun daerah. Upaya ini menandai langkah penting dalam pembangunan kepemudaan di Indonesia, mengingat sebelumnya belum terdapat alat ukur yang komprehensif untuk menilai kinerja pembangunan pemuda secara menyeluruh. Proses penyusunan IPP berlangsung hingga diterbitkannya **Laporan Indeks Pembangunan Pemuda 2017** yang resmi dipublikasikan pada tahun **2018**. Sejak saat itu, IPP diharapkan menjadi **acuan utama** dalam perumusan kebijakan, perencanaan program, serta evaluasi kinerja pembangunan kepemudaan di Indonesia.



Sebelum kehadiran IPP, pengukuran capaian pembangunan pemuda di Indonesia masih dilakukan secara parsial dan sektoral, dengan pendekatan yang lebih menitikberatkan pada output program dari masing-masing kementerian atau lembaga terkait. Pendekatan tersebut belum didukung oleh sistem data statistik yang terintegrasi, sehingga hasil pengukuran tidak mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai kondisi dan dinamika pemuda Indonesia. Dengan adanya IPP, diharapkan para pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun daerah, dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat dan komprehensif mengenai situasi kepemudaan, termasuk variasi dan kesenjangan pembangunan antarprovinsi serta kabupaten/kota. Informasi ini menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan kepemudaan yang lebih efektif, adaptif, dan tepat sasaran.

Dalam proses perumusannya, IPP Indonesia mengacu pada berbagai pendekatan *Youth Development Index* (YDI) yang telah dikembangkan oleh lembaga-lembaga internasional maupun negara-negara lain. Beberapa di antaranya adalah YDI Commonwealth Secretariat (2013), ASEAN YDI, Australian YDI, serta sejumlah indeks pembangunan pemuda di negara-negara Asia Tenggara. Berbagai model tersebut dijadikan rujukan dalam merancang kerangka konseptual dan metodologis IPP, yang mencakup penentuan domain utama, indikator, metodologi perhitungan, serta komponen pembentuk indeks.

Dengan mengadaptasi dan mengintegrasikan elemen-elemen terbaik dari indeks-indeks tersebut, IPP disusun agar mampu memberikan potret menyeluruh tentang kondisi pembangunan pemuda di Indonesia, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, partisipasi, maupun kesempatan dan gender. Pendekatan ini menjadikan IPP sebagai alat strategis yang tidak hanya berfungsi sebagai instrumen statistik, tetapi juga sebagai panduan kebijakan berbasis data (*evidence-based policy*) untuk mendorong pembangunan pemuda yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Hingga pada Mei 2025, struktur IPP terdiri atas 3 lapisan pembangunan yang dipecah ke dalam lima domain pembangunan pemuda. Kelima domain tersebut adalah pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Kelima domain ini secara esensi telah sejalan dengan konsep pembangunan



pemuda yang telah kita pelajari sebelumnya. Saat itu, IPP disusun dari 15 indikator yang tersebar ke dalam masing-masing domain. Indikator tersebut berasal dari sumber data nasional, yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), yang setiap tahun dihitung dan dihasilkan di tingkat nasional dan provinsi, meski terdapat beberapa indikator yang hanya tersedia setiap tiga tahun sekali. Dengan dirumuskannya IPP, IPP menjadi salah satu indikator kinerja bagi Kemenpora yang terdokumentasikan dalam Rencana Strategis Kemenpora, serta indikator RPJMN 2020–2024.



Sumber: Dokumen IPP Nasional 2023

Gambar 2.2 Kerangka Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia 2017 – Mei 2025

Berdasarkan ilustrasi gambar di atas, didapatkan gambaran bahwa pembangunan pemuda memiliki tiga lapisan aspek yang kemudian dibagi ke dalam lima domain dan 15 indikator penyusun.

1. Pembangunan Individu

Pembangunan individu pemuda merupakan kebutuhan yang bisa meningkatkan kapasitas individu dalam menjalani kehidupan. Dua hal yang termasuk dalam lapisan ini adalah domain pendidikan serta domain kesehatan dan kesejahteraan.

Domain Pendidikan memiliki 3 (tiga) indikator yakni rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah, dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi. Adapun domain Kesehatan dan



Kesejahteraan mencakup 4 (empat) indikator yakni angka kesakitan pemuda, persentase pemuda korban kejahatan, persentase pemuda merokok, dan persentase remaja perempuan yang sedang hamil. Sesuai dengan metadata, sumber data dari dua domain ini berasal dari Survei Sosial-ekonomi Nasional atau Susenas.

2. Pembangunan Penghidupan dan Kesejahteraan

Penghidupan dan kesejahteraan pemuda tercermin dari meningkatnya akses mereka terhadap lapangan dan kesempatan kerja. Lapisan ini berkaitan erat dengan peranan pemuda dalam melakukan penetrasi di pasar tenaga kerja. Lapisan ini berisi satu domain yaitu domain Lapangan dan Kesempatan Kerja. Terdapat dua indikator untuk melihat domain ini yaitu persentase pemuda wirausaha kerah putih dan tingkat pengangguran terbuka pemuda. Dua indikator tersebut berasal dari data Survei Tenaga Kerja Nasional atau Sakernas.

3. Partisipasi dalam Berbagai Bidang Kehidupan

Sebagai lapisan terluar dari kerangka kerja IPP, lapisan ini melihat tingkat partisipasi dan kepemimpinan pemuda dalam berbagai bidang kehidupan. Terdapat dua domain yang pada lapisan ini yaitu domain partisipasi dan kepemimpinan serta gender dan diskriminasi.

Partisipasi dan kepemimpinan memiliki tiga indikator yaitu persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan organisasi, dan persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat. Tiga indikator tersebut berasal dari data Susenas Modul Sosial Budaya Pendidikan (MSBP).

Lapisan ini juga mencantumkan aspek gender dan diskriminasi untuk memastikan terwujudnya kesetaraan pembangunan. Domain gender dan diskriminasi memiliki tiga indikator yakni angka perkawinan usia anak, persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas. Data indikator ini berasal dari data Susenas. Juga terdapat indikator persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal yang datanya berasal dari data Sakernas.

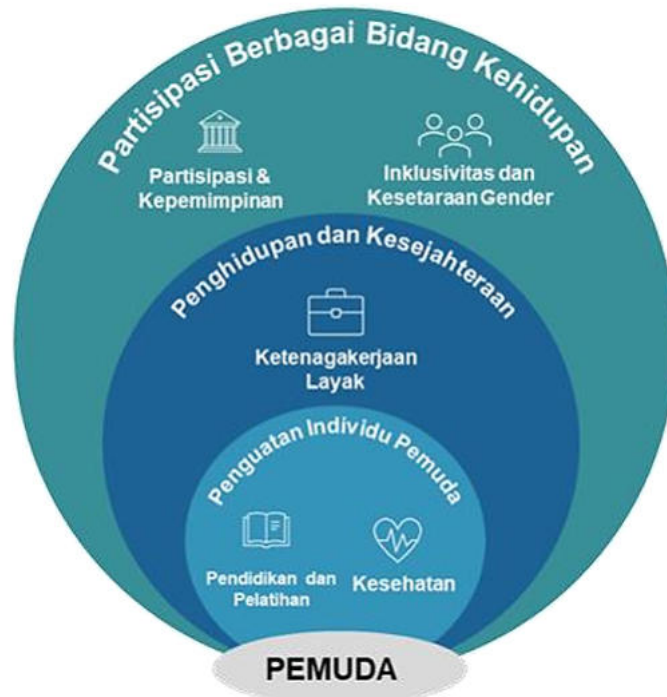
Berdasarkan Laporan IPP Tahun 2021 dan Studi Pendahuluan RPJPN 2025-2045 Bidang Pemuda yang dilakukan pada tahun 2022, telah dirangkum berbagai



keterbatasan IPP dalam mengukur pembangunan pemuda secara representatif. Keterbatasan ini mencakup aspek konseptual dan metodologis. Secara konseptual, IPP yang digunakan sebelumnya belum sepenuhnya mengakomodasi inklusivitas pemuda, terutama bagi pemuda penyandang disabilitas. Selain itu, beberapa indikator penyusun IPP perlu dievaluasi kembali untuk memastikan relevansinya dengan visi dan misi pembangunan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Dari sisi metodologi, perhitungan IPP hanya dapat dilakukan hingga tingkat provinsi, penggunaan agregasi pada tingkat desil, serta faktor teknis lainnya masih menjadi hambatan dalam merepresentasikan kondisi pembangunan pemuda secara akurat.

Dengan mempertimbangkan limitasi-limitasi tersebut, proses peninjauan ulang IPP secara keseluruhan dilakukan sepanjang tahun 2023 hingga 2024. Mengacu pada konsep pembangunan pemuda yang menjadi temuan dari studi pendahuluan RPJPN 2025-2045 bidang kepemudaan, kebijakan pembangunan pemuda di masa mendatang menekankan penguatan individu pemuda, termasuk peningkatan kapasitas dan derajat kesehatan, serta upaya untuk mendorong akses mereka terhadap pekerjaan yang layak dan partisipasi aktif dalam pembangunan. Dengan upaya advokasi yang dilakukan, IPP telah ditetapkan sebagai indikator Prioritas Nasional (PN), sementara indikator turunannya ditetapkan sebagai indikator Program Prioritas (PP) dan Indikator Kegiatan Prioritas (KP) dalam RPJMN 2025–2029.

IPP hasil peninjauan ulang masih terdiri atas tiga lapisan pembangunan pemuda, yaitu lapisan penguatan individu, lapisan penghidupan dan kesejahteraan, serta lapisan partisipasi di berbagai bidang kehidupan. Ketiga lapisan ini mencerminkan komponen yang diperlukan untuk mewujudkan konsep pembangunan manusia secara utuh, yaitu kebebasan dalam mengambil keputusan, kemampuan untuk memperluas pilihan, dan ruang untuk meningkatkan kapasitas diri.



Sumber: Panduan Teknis Pemanfaatan Indeks Pembangunan Pemuda dalam Perumusan Kebijakan Berbasis Bukti, BAPPENAS 2025

Gambar 2.3 Kerangka Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia Hasil Peninjauan Ulang 2025

1. Lapisan Penguatan Individu Pemuda

Lapisan ini mencerminkan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar, yang terdiri dari dua domain utama, yaitu pendidikan dan kesehatan. Kedua domain ini sangat penting dalam meningkatkan kemampuan individu untuk membuat pilihan, beraktivitas, dan mengembangkan kreativitas. Penguatan individu dinilai melalui domain pendidikan dan pelatihan, yang mencakup keterlibatan pemuda dalam pendidikan formal dan non-formal, serta domain kesehatan yang mengukur kondisi kesehatan fisik, mental, dan reproduksi pemuda.

2. Lapisan Pembangunan Penghidupan dan Kesejahteraan

Keberhasilan pembangunan individu tercermin dari peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan. Hal ini dapat dilihat melalui meningkatnya akses terhadap lapangan kerja dan kesempatan kerja yang layak. Ketersediaan pekerjaan yang berkualitas serta kemampuan pemuda untuk bersaing di pasar kerja menunjukkan daya saing yang tinggi, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemuda dalam angkatan kerja. Selain itu, kemampuan pemuda untuk menjadi



wirausahawan mandiri menunjukkan kapasitas dan kemandirian mereka dalam mengembangkan diri. Lapisan ini diukur melalui domain ketenagakerjaan layak.

3. Lapisan Partisipasi dalam Berbagai Aspek Kehidupan

Kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan yang adil dan berkelanjutan merupakan kebutuhan penting yang dapat meningkatkan kualitas hidup individu. Partisipasi ini diwujudkan melalui organisasi yang menyediakan ruang untuk berdiskusi, bekerja sama, dan mengekspresikan diri, serta dijamin oleh kebebasan berpendapat. Mengingat bahwa pemuda bukan kelompok homogen, pembangunan pada setiap lapisan harus dilakukan secara inklusif. Tujuannya adalah memastikan bahwa pemuda, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk pemuda dengan disabilitas, dapat berpartisipasi secara setara tanpa diskriminasi atau eksklusi. Lapisan ini dinilai melalui domain partisipasi dan kepemimpinan serta domain inklusivitas dan kesetaraan gender.



3 METODOLOGI PERHITUNGAN IPP PENINJAUAN ULANG DAN DINAMIKA



KEPEMUDAAN JAWA



TENGAH





3.1 METODOLOGI PERHITUNGAN IPP

3.1.1 Pendekatan

Pendekatan dipahami sebagai landasan berpikir yang ditata secara sistematis berdasarkan bidang atau aspek tertentu, yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengurai persoalan sesuai konteks, tujuan, dan sasaran analisis. Dalam penghitungan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Provinsi Jawa Tengah, beberapa pendekatan dasar yang digunakan meliputi:

1. Pendekatan Komprehensif

Pendekatan komprehensif digunakan untuk melihat berbagai dimensi pembangunan secara terpadu sehingga fenomena yang dikaji dapat dipahami secara menyeluruh. Pada pengukuran IPP, strategi ini memasukkan seluruh komponen pembangunan kepemudaan—mulai dari pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan hingga partisipasi sosial serta kesetaraan gender. Penggunaan pendekatan ini membantu menyajikan potret pembangunan pemuda yang lebih lengkap dan akurat. Namun, prosesnya memerlukan analisis yang lebih rinci serta alokasi waktu dan sumber daya yang lebih besar dibandingkan pendekatan yang hanya meninjau sebagian aspek saja.

2. Pendekatan Studi Literatur

Pendekatan studi literatur ditempuh dengan meninjau berbagai referensi tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan kajian, hingga dokumen kebijakan yang relevan. Melalui eksplorasi literatur tersebut, diperoleh dasar konseptual dan pemahaman teoretis terkait pembangunan kepemudaan serta teknik pengukuran indeks yang telah diterapkan di wilayah lain. Pendekatan ini memperkuat pijakan akademik dalam penyusunan analisis IPP Jawa Tengah, sekaligus membantu menemukan kesenjangan konseptual maupun data yang perlu dilengkapi dan diperdalam.

3. Pendekatan Survei Lapangan



Survei lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data primer langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara, atau penyebaran kuesioner. Pendekatan ini memberikan informasi faktual mengenai realitas kepemudaan di daerah, sehingga dapat melengkapi data sekunder yang bersumber dari lembaga resmi. Temuan lapangan juga menambahkan pemahaman yang lebih konkret tentang capaian, hambatan, serta peluang pengembangan pemuda di tingkat lokal.

3.1.2 Metodologi Perhitungan IPP Provinsi Jawa Tengah 2025

Indeks merupakan suatu metode pengukuran standar yang digunakan untuk menilai kinerja pada bidang atau aspek pembangunan tertentu. Indeks disusun melalui penggabungan sejumlah variabel atau akumulasi skor dari berbagai elemen individu yang saling berkaitan. Dalam konteks statistik dan penelitian, indeks berfungsi sebagai ukuran gabungan yang merepresentasikan perubahan dalam sekumpulan data yang menggambarkan kondisi berbagai unit pengamatan. Oleh karena itu, indeks sering disebut juga sebagai indikator komposit.

Menurut OECD (2005), indikator adalah ukuran kuantitatif maupun kualitatif yang bersumber dari fakta-fakta empiris dan digunakan untuk menunjukkan posisi relatif suatu entitas—misalnya negara atau daerah—dalam bidang tertentu. Apabila indikator dievaluasi secara periodik, maka dapat memberikan gambaran mengenai arah perubahan dan perkembangan yang terjadi dari waktu ke waktu. Dalam konteks perumusan kebijakan, indikator berperan penting untuk mengidentifikasi tren, menyoroti isu-isu prioritas, menentukan arah kebijakan, serta melakukan pemantauan dan perbandingan kinerja antarwilayah.

Indikator komposit merupakan gabungan dari sejumlah indikator tunggal yang disusun ke dalam satu ukuran terpadu berdasarkan model tertentu. Tujuannya adalah untuk mengukur suatu konsep yang bersifat multidimensi—yakni konsep yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu indikator saja. Contoh konsep multidimensi ini antara lain mencakup



daya saing, industrialisasi, keberlanjutan pembangunan, integrasi ekonomi, serta masyarakat berbasis pengetahuan.

Penggunaan indikator komposit semakin meluas dalam analisis kebijakan dan komunikasi publik karena mampu menyederhanakan fenomena yang kompleks menjadi ukuran yang lebih mudah dipahami. Indikator ini juga memudahkan perbandingan kinerja antarwilayah atau antarnegara dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, lingkungan, dan teknologi. Namun demikian, penyusunan indikator komposit harus dilakukan secara hati-hati, karena kesalahan dalam perancangan atau interpretasi dapat mengarah pada penetapan kebijakan yang kurang tepat.

Beberapa contoh indeks yang telah banyak digunakan antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Ketimpangan (Gini Index), serta Indeks Dow Jones di bidang keuangan. Di antara berbagai indeks tersebut, IPM merupakan salah satu yang paling dikenal. IPM mengukur capaian rata-rata pembangunan manusia melalui tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Dimensi kesehatan diukur melalui harapan hidup saat lahir, dimensi pendidikan dilihat dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, sedangkan dimensi standar hidup diukur melalui pendapatan nasional bruto per kapita. Nilai dari ketiga dimensi tersebut kemudian dinormalisasi dan digabungkan menggunakan rata-rata geometris untuk menghasilkan satu nilai indeks komposit yang merepresentasikan tingkat pembangunan manusia di suatu wilayah.

Dalam konteks Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), proses penentuan nilai indeks mengikuti tahapan dan prinsip penyusunan indeks sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Pada tahun 2015, pemerintah mulai menyusun sebuah indeks untuk memantau capaian pembangunan pemuda di Indonesia, yaitu IPP. Proses ini berlangsung hingga dirilisnya Laporan Indeks Pembangunan Pemuda 2017 yang dipublikasikan pada 2018. Sejak saat itu, IPP diharapkan menjadi pijakan penyusunan kebijakan terkait bidang kepemudaan di Indonesia. Sebelum IPP tersedia di Indonesia, pengukuran kinerja pembangunan pemuda masih belum



dilakukan secara komprehensif. Pendekatan yang digunakan cenderung menggunakan output dari program yang dilaksanakan kementerian terkait dan tidak menggunakan data statistik yang komprehensif. Keberadaan IPP diharapkan dapat membantu pemangku kepentingan di bidang kepemudaan untuk melihat situasi dan kondisi kepemudaan di Indonesia serta variasinya antar-provinsi dan kabupaten/kota guna merumuskan kebijakan pembangunan pemuda yang tepat sasaran.

Perumusan IPP saat itu merujuk ke berbagai pendekatan Youth Development Index (YDI) yang telah dikembangkan di sejumlah lembaga internasional maupun negara. Sejumlah YDI yang dipertimbangkan, seperti YDI yang dikembangkan oleh Commonwealth Secretariat pada tahun 2013, ASEAN YDI, Australian YDI, dan sejumlah indeks pembangunan pemuda di negara-negara Asia Tenggara. Kerangka IPP yang digunakan Indonesia mengadaptasi dan mempertimbangkan berbagai kerangka pembentuk indeks-indeks tersebut, seperti domain, indikator, metodologi, dan berbagai komponen pembentuk indeks guna membangun IPP yang mampu menggambarkan kondisi pembangunan pemuda sebaik mungkin.



Domain Pendidikan

- Rata-rata Lama Sekolah Pemuda
- Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah
- Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi

Domain Kesehatan

- Angka kesakitan pemuda
- Pemuda Korban Kejahatan
- Pemuda Merokok
- Persentase remaja perempuan yang sedang hamil

Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja

- Presentase Wirausaha Keras Putih
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda

Domain Partisipasi dan Kepemimpinan

- Persentase pemuda mengikuti kegiatan sosmas
- Persentase pemuda aktif dalam organisasi
- Persentase pemuda yang berpendapat dalam rapat

Domain Gender dan Diskriminasi

- Angka perkawinan usia anak
- Persentase pemuda perempuan yang sedang sekolah menengah dan perguruan tinggi
- Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal

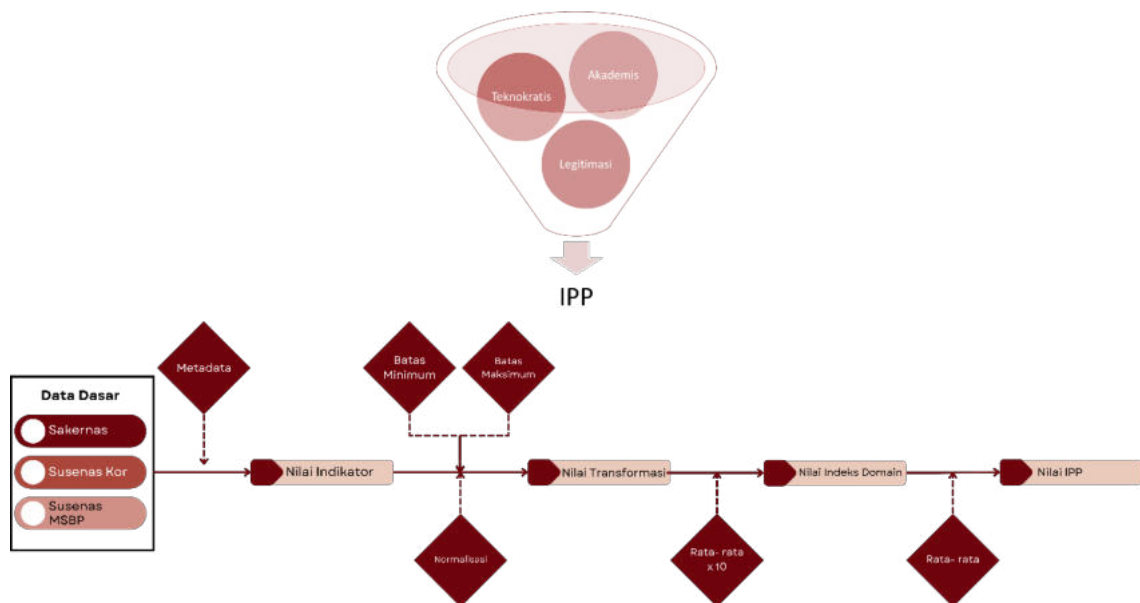
Gambar 3.1 Domain dan Indikator IPP 2017 – Mei 2025

Struktur IPP di atas dimanfaatkan hingga tahun 2024. Berdasarkan struktur ini, IPP terdiri atas tiga lapisan pembangunan yang dipecah ke dalam lima domain pembangunan pemuda. Kelima domain tersebut adalah pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Kelima domain ini secara esensi telah sejalan dengan konsep pembangunan pemuda yang telah kita pelajari sebelumnya. Saat itu, IPP disusun dari 15 indikator yang tersebar ke dalam masing-masing domain. Indikator tersebut berasal dari sumber data nasional, yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), yang setiap tahun dihitung dan dihasilkan di tingkat nasional dan provinsi, meski terdapat beberapa indikator yang hanya tersedia setiap tiga tahun sekali. Dengan dirumuskannya IPP, IPP menjadi salah satu



indikator kinerja bagi Kemenpora yang terdokumentasikan dalam Rencana Strategis Kemenpora, serta indikator RPJMN 2020–2024.

Tahapan perhitungan dilakukan dalam 3 tahapan yaitu menghitung capaian nilai indikator, capaian nilai domain, dan terakhir adalah perhitungan nilai capaian IPP daerah. Proses pertama adalah melakukan normalisasi pada nilai masing – masing indikator. Proses selanjutnya adalah mengonversi nilai indikator ke dalam bentuk desil untuk memperoleh nilai indikator yang telah ditransformasikan. Dengan kata lain, nilai indikator yang awalnya berupa nilai kontinu diubah menjadi nilai diskrit yang dikelompokkan ke dalam 10 kelompok nilai (dengan nilai terendah = 1 dan tertinggi = 10). Dan proses terakhir adalah menghitung nilai indeks domain. Nilai indeks domain dapat dihitung berdasarkan rata-rata nilai transformasi indikator pada masing – masing domain lalu dikalikan 10 sehingga menghasilkan nilai indeks domain antara 0-100. Kemudian nilai IPP dihitung berdasarkan rata rata nilai seluruh indeks domain sehingga menghasilkan nilai IPP antara 0-100.



Dokumen Pedoman Indeks Pembangunan Pemuda, Kemenpora 2021

Gambar 3.2 Alur Proses Perhitungan IPP 2017 – Mei 2025

Berdasarkan Laporan IPP Tahun 2021 dan Studi Pendahuluan RPJPN 2025-2045 Bidang Pemuda yang dilakukan pada tahun 2022, telah dirangkum berbagai keterbatasan IPP dalam mengukur pembangunan pemuda secara representatif. Keterbatasan ini mencakup aspek konseptual



dan metodologis. Secara konseptual, IPP yang ada saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi inklusivitas pemuda, terutama bagi pemuda penyandang disabilitas. Selain itu, beberapa indikator penyusun IPP perlu dievaluasi kembali untuk memastikan relevansinya dengan visi dan misi pembangunan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Dari sisi metodologi, perhitungan IPP hanya dapat dilakukan hingga tingkat provinsi, penggunaan agregasi pada tingkat desil, serta faktor teknis lainnya masih menjadi hambatan dalam merepresentasikan kondisi pembangunan pemuda secara akurat.

Dengan mempertimbangkan limitasi-limitasi tersebut, proses peninjauan ulang IPP secara keseluruhan dilakukan sepanjang tahun 2023 hingga 2024. Mengacu pada konsep pembangunan pemuda yang menjadi temuan dari studi pendahuluan RPJPN 2025-2045 bidang kepemudaan, kebijakan pembangunan pemuda di masa mendatang menekankan penguatan individu pemuda, termasuk peningkatan kapasitas dan derajat kesehatan, serta upaya untuk mendorong akses mereka terhadap pekerjaan yang layak dan partisipasi aktif dalam pembangunan. Dengan upaya advokasi yang dilakukan, IPP telah ditetapkan sebagai indikator Prioritas Nasional (PN), sementara indikator turunannya ditetapkan sebagai indikator Program Prioritas (PP) dan Indikator Kegiatan Prioritas (KP) dalam RPJMN 2025–2029.



Domain Pendidikan dan Pelatihan

- Persentase pemuda mendapatkan pelatihan bersertifikat
- Persentase pemuda yang memiliki ijazah SMA/ sederajat atau lebih tinggi
- Persentase pemuda dengan keterampilan TIK

Domain Kesehatan

- Angka kesakitan pemuda
- Persentase pemuda yang merokok
- Persentase pemuda yang berolahraga
- Persentase remaja perempuan yang sedang hamil

Domain Ketenagakerjaan Layak

- Persentase pemuda NEET
- Persentase pemuda pekerja tidak penuh
- Rasio kewirausahaan pemuda

Domain Partisipasi dan Kepemimpinan

- Persentase pemuda mengikuti kegiatan sosmas
- Persentase pemuda aktif mengikuti organisasi
- Persentase pemuda yang menduduki posisi manajerial

Domain Inklusivitas dan Kesetaraan Gender

- Rasio TPAK pemuda perempuan terhadap laki-laki
- Persentase pemuda penyandang disabilitas yang bekerja
- Persentase perkawinan anak

Sumber: Panduan Teknis Pemanfaatan Indeks Pembangunan Pemuda dalam Perumusan Kebijakan Berbasis Bukti, BAPPENAS 2025

Gambar 3.3 Domain dan Indikator IPP Hasil Peninjauan Ulang 2025

Struktur IPP hasil peninjauan ulang masih dibagi menjadi tiga lapisan pembangunan pemuda, seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas, yaitu lapisan penguatan individu, lapisan penghidupan dan kesejahteraan, serta lapisan partisipasi di berbagai bidang kehidupan. Ketiga lapisan ini mencerminkan komponen yang diperlukan untuk mewujudkan konsep pembangunan manusia secara utuh, yaitu kebebasan dalam mengambil keputusan, kemampuan untuk memperluas pilihan, dan ruang untuk meningkatkan kapasitas diri.

Secara konseptual, tidak ada perubahan signifikan antara IPP metode lama dan hasil peninjauan ulang. Perbedaan paling mencolok ada pada metodologi, penajaman domain dan indikator, didisagregasi nilai



indeks hingga level kabupaten/kota (meskipun dengan sejumlah keterbatasan). Peninjauan ulang ini bertujuan menjadikan IPP sebagai tolok ukur yang lebih akurat dan ideal dalam mengukur pembangunan pemuda. Peninjauan Ulang terhadap IPP mencerminkan meningkatnya kesadaran pemangku kepentingan terhadap kompleksitas pembangunan pemuda. Selanjutnya, dengan mengarah langsung pada aspek-aspek yang dibutuhkan oleh pemuda, pemangku kepentingan dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat bagi pembangunan pemuda. Dengan demikian, perubahan ini tidak hanya sekadar pembaruan konsep dan metodologi, tetapi juga merupakan langkah strategis menuju perbaikan kondisi pemuda di masa yang akan datang.

Dalam penyusunan perhitungan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Hasil Peninjauan Ulang Tahun 2025, digunakan metodologi yang mengombinasikan dua pendekatan utama, yaitu pembobotan berbasis *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dan penetapan batas minimum serta maksimum untuk setiap indikator.

Metode AHP dipilih karena memiliki karakter partisipatoris, yakni melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang berkompeten dalam bidang kepemudaan. Melalui pendekatan ini, diperoleh bobot prioritas yang dianggap paling relevan dengan isu-isu strategis dan tantangan aktual yang dihadapi pemuda Indonesia. Hasil pembobotan menunjukkan bahwa domain pendidikan dan pelatihan memiliki bobot tertinggi sebesar 21%, yang menegaskan bahwa peningkatan kualitas dan keterampilan pemuda merupakan fondasi utama dalam pembangunan kepemudaan. Di sisi lain, dalam domain ketenagakerjaan layak, indikator pemuda NEET (*Not in Education, Employment, or Training*) menempati bobot tertinggi di antara indikator lainnya, yaitu 35%, yang mencerminkan bahwa isu NEET menjadi salah satu tantangan paling krusial dalam pengembangan ketenagakerjaan pemuda saat ini.

Sementara itu, proses penetapan nilai minimum dan maksimum indikator—atau dikenal juga sebagai tahapan normalisasi—dilaksanakan melalui kombinasi antara diskusi ahli, penilaian rasionalitas data, serta analisis statistik terhadap tren historis masing-masing indikator. Sebagai



contoh, pada indikator persentase pemuda yang mengikuti pelatihan bersertifikat, data historis selama sepuluh tahun terakhir menunjukkan kisaran antara 4% hingga 20%. Apabila nilai maksimum ditetapkan sebesar 100%, maka hasil penghitungan akan menjadi tidak realistis karena pencapaian nilai tersebut sulit diwujudkan dalam jangka waktu menengah (lima tahun). Penetapan batas maksimum yang terlalu tinggi berpotensi menyebabkan distorsi hasil indeks, yaitu penurunan nilai agregat secara tidak proporsional terhadap kondisi riil di lapangan.

Dengan demikian, penerapan batas minimum dan maksimum yang lebih rasional menghasilkan nilai agregat yang lebih representatif dan mencerminkan kondisi aktual kepemudaan. Pendekatan ini menjadikan hasil IPP lebih akurat, valid, dan kontekstual, sehingga dapat digunakan sebagai landasan yang kuat dalam perumusan kebijakan kepemudaan, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Selanjutnya, pada bagian berikut akan disajikan ringkasan metodologi pembobotan serta penetapan nilai minimum dan maksimum dari masing-masing indikator yang digunakan dalam perhitungan IPP hasil peninjauan ulang tahun 2025.

Tabel 3.1 Metodologi Penghitungan IPP Hasil Peninjauan Ulang

Domain	Bobot Domain	Indikator	Bobot Indikator	Batas Min	Batas Maks
Pendidikan dan Pelatihan	0,21	Persentase pemuda mendapatkan pelatihan bersertifikat	0,33	0	40,89
		Persentase pemuda yang memiliki ijazah SMA/ sederajat atau lebih tinggi	0,34	0	92,95
		Persentase pemuda dengan keterampilan TIK	0,33	0	100
Kesehatan	0,2	Angka kesakitan pemuda	0,26	60,39	0
		Persentase pemuda yang merokok	0,23	53,18	3,63
		Persentase pemuda yang berolahraga	0,26	0	70
		Persentase remaja perempuan yang sedang hamil	0,25	49,01	0
Ketenagakerjaan Layak	0,2	Persentase pemuda NEET	0,35	53	10
		Persentase pemuda pekerja tidak penuh	0,32	76	20



Domain	Bobot Domain	Indikator	Bobot Indikator	Batas Min	Batas Maks
Partisipasi dan kepemimpinan	0,2	Rasio kewirausahaan pemuda	0,33	0	2,5
		Persentase pemuda mengikuti kegiatan sosmas	0,34	0	100
		Persentase pemuda aktif mengikuti organisasi	0,33	0	18,5
		Persentase pemuda yang menduduki posisi manajerial	0,33	0	4
Inklusivitas dan kesetaraan gender	0,19	Rasio TPAK pemuda perempuan terhadap laki-laki	0,33	0	100
		Persentase pemuda penyandang disabilitas yang bekerja	0,35	0	58
		Persentase perkawinan anak	0,32	68,99	0

Sumber: Laporan Peninjauan Ulang IPP, Kemenpora

Proses penetapan nilai maksimum dan minimum dalam perhitungan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dilakukan melalui metode normalisasi, yang berfungsi untuk menstandarkan nilai dari setiap indikator maupun domain. Tujuan utama normalisasi ini adalah agar capaian antarindikator dan antardomain dapat dibandingkan secara proporsional, sehingga masing-masing memiliki skala pengukuran yang seragam.

Metode normalisasi yang digunakan dalam penghitungan IPP mengombinasikan penetapan batas minimum dan maksimum dengan rentang nilai antara 0 hingga 100, disertai dengan pertimbangan terhadap tren historis data. Pendekatan ini memungkinkan setiap indikator memiliki skala yang lebih representatif terhadap kondisi faktual di lapangan.

Adapun rumus normalisasi untuk indikator yang memiliki arah positif (yaitu semakin tinggi nilainya, semakin baik kinerjanya) dirumuskan sebagai berikut:

$$z_{ji} = 100 \times \frac{X_{ijk} - X_{ij(min)}}{X_{ij(max)} - X_{ij(min)}}$$

Sementara apabila indikator memiliki arah negatif, formulasinya adalah:

$$z_{ji} = \left(-100 \times \frac{X_{ijk} - X_{ij(min)}}{X_{ij(max)} - X_{ij(min)}} \right) + 100$$



Setelah seluruh nilai indikator dinormalisasi dan dihitung, tahap selanjutnya adalah melakukan agregasi nilai pada masing-masing domain. Proses ini bertujuan untuk memperoleh skor capaian domain yang merepresentasikan kondisi pembangunan kepemudaan pada aspek tertentu.

Metode yang digunakan dalam penghitungan nilai domain adalah metode agregasi aritmetika, di mana setiap indikator dalam suatu domain dikombinasikan berdasarkan bobot yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun formulasi pada tingkat domain dirumuskan sebagai berikut:

$$r_j = \sum_{k=1}^m w_{ijnk} x_{jnk}$$

r_{ijn} : Nilai indeks pada domain

w_{ij} : Bobot pada masing – masing indikator

x_{ij} : Indikator nomor-j pada domain -i

Selanjutnya, setelah nilai setiap domain diperoleh, dilakukan perhitungan nilai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) secara keseluruhan melalui agregasi antar-domain. Proses ini juga menggunakan pendekatan agregasi aritmetika dengan memperhitungkan bobot masing-masing domain. Formula perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$IPP_i = \sum_{k=1}^m wt_i r_i$$

IPP_i : Nilai indeks IPP

wt_i : Bobot pada masing-masing domain

3.2 DINAMIKA KEPEMUDAAN JAWA TENGAH

3.2.1 Aspek Geografis

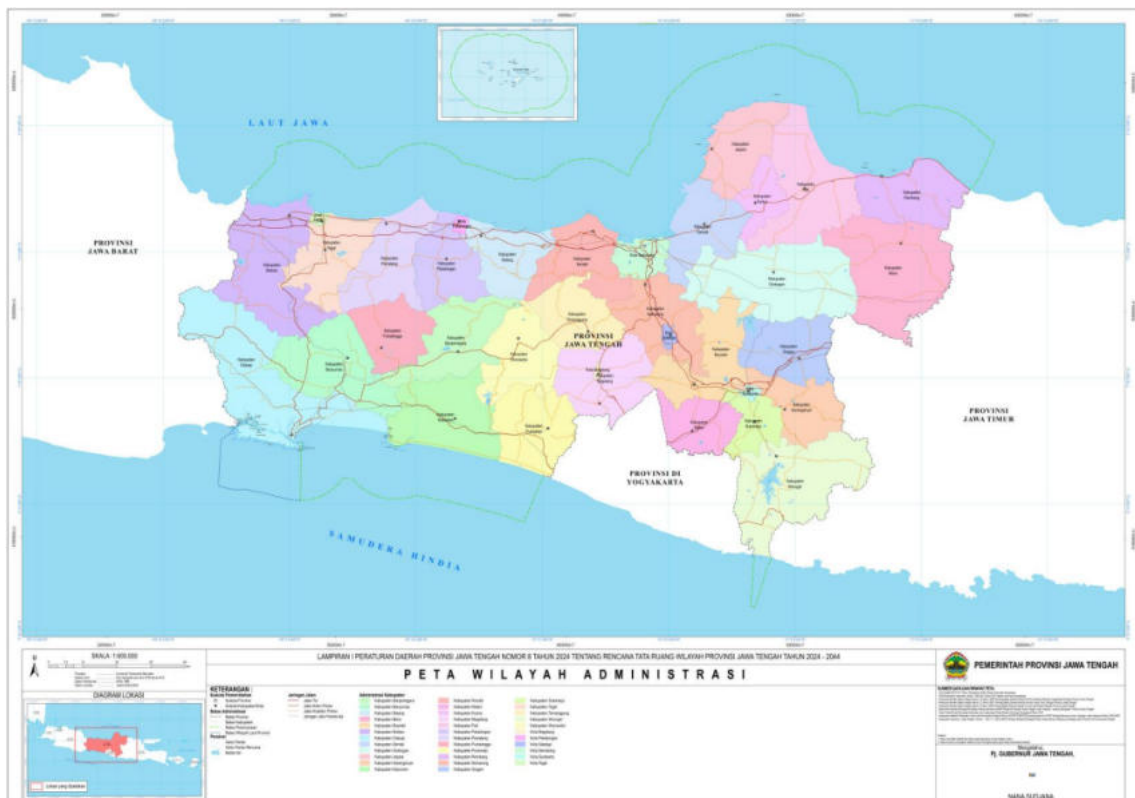
Secara administratif, Jawa Tengah adalah sebuah provinsi yang terletak di Pulau Jawa, Indonesia. Dari sudut pandang astronomis, wilayah ini membentang dari 5°40' sampai 8°30' Lintang Selatan dan dari 108°30' hingga 111°30' Bujur Timur. Posisi di garis lintang ini menandakan bahwa Jawa Tengah beriklim tropis, dengan ciri khasnya yaitu dua musim—musim hujan dan musim kemarau—serta suhu udara yang cenderung hangat sepanjang tahun.



Dari sisi geografis, Provinsi Jawa Tengah dikelilingi oleh berbagai batas alam dan wilayah administrasi, di antaranya:

- Utara: Berbatasan dengan Laut Jawa
- Timur: Berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur
- Timur: Berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur
- Barat: Berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat

Lokasi yang strategis dan kondisi iklim yang menguntungkan ini menjadi landasan bagi tingginya potensi Jawa Tengah di berbagai bidang, seperti pertanian, industri, pariwisata, serta pengembangan kualitas sumber daya manusia dan pemuda yang merata di semua kabupaten dan kota.



Perda Provinsi Jawa Tengah No. 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044

Gambar 3.4 Peta Administrasi Provinsi Jawa Tengah

Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota, yang secara keseluruhan membawahi 576 kecamatan. Di bawah tingkat kecamatan, terdapat total 8.563 desa dan kelurahan, menjadikan Provinsi Jawa Tengah sebagai provinsi dengan jumlah desa



dan kelurahan terbanyak di Indonesia. Jumlah yang besar ini menunjukkan kompleksitas administratif sekaligus potensi besar dalam pengelolaan sumber daya, termasuk pembangunan sosial dan kepemudaan.

Wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah tidak hanya mencakup daratan utama di Pulau Jawa, tetapi juga meliputi sejumlah wilayah kepulauan, seperti:

1. Pulau Nusakambangan, yang terletak di bagian selatan dan berada dekat dengan perbatasan Provinsi Jawa Barat, serta
2. Kepulauan Karimunjawa, yang terletak di Laut Jawa dan termasuk dalam wilayah administratif Kabupaten Jepara.

Secara keseluruhan, luas wilayah Provinsi Jawa Tengah mencapai sekitar 3,28 juta hektar, atau setara dengan 25,04% dari total luas Pulau Jawa. Berikut merupakan distribusi luas wilayah menurut kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 3.2 Luas Wilayah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota	Ibukota Kabupaten/Kota	Luas (km ²)	Presentase (%)
<i>Kabupaten/Regency</i>				
1	Cilacap	Cilacap	2.323,93	6,77
2	Banyumas	Purwokerto	1.391,15	4,05
3	Purbalingga	Purbalingga	805,76	2,35
4	Banjarnegara	Banjarnegara	1.144,9	3,33
5	Kebumen	Kebumen	1.334,1	3,89
6	Purworejo	Purworejo	1.081,96	3,15
7	Wonosobo	Wonosobo	1.011,62	2,95
8	Magelang	Mungkid	1.129,98	3,29
9	Boyolali	Boyolali	1.096,59	3,19
10	Klaten	Klaten	701,5	2,04
11	Sukoharjo	Sukoharjo	493,53	1,44
12	Wonogiri	Wonogiri	1.905,74	5,55
13	Karanganyar	Karanganyar	803,05	2,34
14	Sragen	Sragen	994,57	2,90
15	Grobogan	Purwodadi	2.023,85	5,89
16	Blora	Blora	1.957,29	5,70
17	Rembang	Rembang	1.034,54	3,01
18	Pati	Pati	1.572,90	4,58
19	Kudus	Kudus	447,44	1,30



No	Kabupaten/Kota	Ibukota Kabupaten/Kota	Luas (km ²)	Presentase (%)
20	Jepara	Jepara	1.020,25	2,97
21	Demak	Demak	977,77	2,85
22	Semarang	Ungaran	1.019,27	2,97
23	Temanggung	Temanggung	864,83	2,52
24	Kendal	Kendal	1.008,12	2,94
25	Batang	Batang	857,27	2,50
26	Pekalongan	Kajen	892,91	2,60
27	Pemalang	Pemalang	1.134,41	3,30
28	Tegal	Slawi	983,9	2,87
29	Brebes	Brebes	1.744,81	5,08
Kota/ Municipality				
1	Magelang	Magelang	18,56	0,05
2	Surakarta	Surakarta	46,72	0,14
3	Salatiga	Salatiga	54,98	0,16
4	Semarang	Semarang	370	1,08
5	Pekalongan	Pekalongan	46,20	0,13
6	Tegal	Tegal	39,08	0,11
Jawa Tengah			32.800,69	100

Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2025

Kabupaten Cilacap menempati posisi sebagai wilayah terluas di Provinsi Jawa Tengah, dengan total luas mencapai 2.323,93 km², atau sekitar 6,77% dari total luas provinsi. Kondisi geografis Cilacap yang mencakup wilayah pesisir, dataran rendah, dan kawasan industri strategis menjadikannya sebagai wilayah dengan tantangan sekaligus potensi besar dalam pembangunan lintas sektor.

Sementara itu, di antara kota administratif, Kota Semarang merupakan kota terluas, dengan cakupan wilayah sebesar 370 km² atau sekitar 1,08% dari luas total Provinsi Jawa Tengah. Kota ini juga berfungsi sebagai ibu kota provinsi dan pusat pemerintahan, pendidikan, serta perekonomian di Jawa Tengah.

Sebaliknya, Kota Magelang merupakan kota dengan luas wilayah terkecil di Provinsi Jawa Tengah, yakni hanya 18,56 km², atau sekitar 0,05% dari luas provinsi. Meskipun secara geografis tergolong kecil, Kota Magelang memiliki posisi strategis dalam pengembangan sektor



pendidikan dan jasa, serta terhubung erat dengan wilayah sekitarnya di Kabupaten Magelang dan wilayah eks-Karesidenan Kedu.



Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2025

Gambar 3.5 Persentase Luas Wilayah Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah

3.2.2 Aspek Demografi

Penduduk adalah aset pembangunan yang sangat vital. Dalam proses pembangunan daerah, peran mereka melampaui sekadar penerima manfaat, karena merekalah penggerak utama yang memastikan pembangunan dapat berjalan. Dari perspektif pengembangan wilayah, masyarakat berfungsi sebagai subjek aktif yang bertanggung jawab untuk mengelola, memanfaatkan, dan menjaga sumber daya secara arif dan berkelanjutan.

Keberadaan penduduk dalam pembangunan memiliki dua sisi: sebagai modal sekaligus hambatan. Sebuah populasi yang besar dapat menjadi motor penggerak pembangunan jika didukung oleh kualitas sumber daya manusia (seperti pendidikan, keterampilan, dan kesehatan) yang mumpuni. Sebaliknya, jika kualitasnya rendah, jumlah penduduk yang besar justru berpotensi menjadi beban dalam berbagai aspek, mulai dari sosial, ekonomi, hingga lingkungan.



Merujuk pada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, jumlah penduduk provinsi ini pada 2024 mencapai 37.892.280 jiwa. Angka ini mengukuhkan Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi dengan populasi terpadat di Indonesia. Data kependudukan ini merupakan fondasi kritikal untuk menyusun kebijakan pembangunan yang berperspektif demografi, termasuk dalam merencanakan program untuk kepemudaan, ketenagakerjaan, pendidikan, serta layanan sosial.

Selanjutnya, rincian jumlah penduduk untuk setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

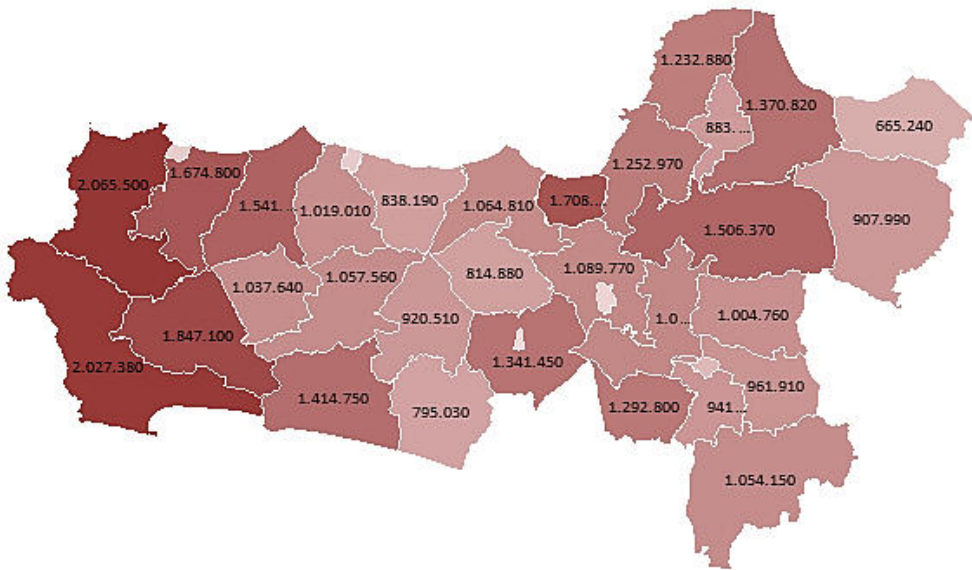
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah 2023-2024

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk		Kepadatan (Jiwa/km ²)	
	2023	2024	2023	2024
Kabupaten				
Cilacap	2.007.830	2.027.380	864	872
Banyumas	1.828.570	1.847.100	1314	1328
Purbalingga	1.027.330	1.037.640	1275	1288
Banjarnegara	1.047.230	1.057.560	915	924
Kebumen	1.397.560	1.414.750	1048	1060
Purworejo	788.270	795.030	729	735
Wonosobo	909.660	920.510	899	910
Magelang	1.330.660	1.341.450	1178	1187
Boyolali	1.090.130	1.099.850	994	1003
Klaten	1.284.390	1.292.800	1839	1851
Sukoharjo	932.680	941.650	1890	1908
Wonogiri	1.051.090	1.054.150	552	553
Karanganyar	955.120	961.910	1189	1198
Sragen	997.490	1.004.760	1003	1010
Grobogan	1.492.890	1.506.370	738	744
Blora	901.620	907.990	461	464
Rembang	660.170	665.240	636	641
Pati	1.359.360	1.370.820	864	872
Kudus	874.630	883.320	1955	1974
Jepara	1.221.090	1.232.880	1196	1208
Demak	1.240.510	1.252.970	1269	1281
Semarang	1.080.650	1.089.770	1060	1069
Temanggung	808.450	814.880	935	942
Kendal	1.052.830	1.064.810	1044	1056
Batang	828.880	838.190	967	978



Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk		Kepadatan (Jiwa/km ²)	
	2023	2024	2023	2024
Pekalongan	1.007.380	1.019.010	1128	1141
Pemalang	1.523.620	1.541.690	1340	1355
Tegal	1.654.840	1.674.800	1682	1702
Brebes	2.043.080	2.065.500	1172	1185
Kota				
Magelang	122.150	122.430	6581	6596
Surakarta	526.870	528.040	11277	11302
Salatiga	198.920	201.270	3618	3661
Semarang	1.694.740	1.708.830	4580	4618
Pekalongan	317.520	321.100	6873	6950
Tegal	282.780	285.840	7238	7316
TOTAL	37.540.960	37.892.280	1093	1104

Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2025



Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2025

Gambar 3.6 Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah, 2024

Dari sisi kepadatan penduduk, Kota Surakarta mencatatkan angka tertinggi di Jawa Tengah dengan 11.302 jiwa per km² pada tahun 2024. Tingkat kepadatan yang sangat tinggi ini menggambarkan karakter kota besar yang sangat padat, dengan intensitas pemanfaatan ruang yang maksimal dan tuntutan akan layanan publik serta infrastruktur yang jauh lebih rumit.



Di sisi berlawanan, Kabupaten Blora memiliki tingkat kepadatan terendah, yaitu hanya 464 jiwa per km². Kondisi ini merefleksikan ciri kawasan pedesaan yang masih memiliki lahan luas dengan sebaran pemukiman penduduk yang cenderung tidak merata.

Kesenjangan kepadatan yang begitu besar antar daerah ini menjadi pertimbangan mendasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang memperhatikan aspek keruangan secara adil dan tepat sasaran. Hal ini juga menjadi dasar dalam menyusun program kepemudaan yang diselaraskan dengan kondisi kependudukan masing-masing daerah.

Aspek demografi di Provinsi Jawa Tengah tidak hanya dianalisis dari sisi jumlah dan kepadatan penduduk, tetapi juga ditinjau berdasarkan struktur usia penduduk yang mencerminkan komposisi usia produktif dan non-produktif di wilayah ini. Struktur usia menjadi indikator penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan, khususnya dalam bidang ketenagakerjaan, pendidikan, dan kepemudaan.

Selain itu, aspek demografi juga dilihat dari rasio jenis kelamin, yaitu perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dalam suatu wilayah. Rasio ini berperan penting dalam perencanaan pembangunan sosial, ekonomi, serta distribusi layanan publik yang responsif gender.

Informasi mengenai jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2024

Rentang Umur (tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki - Laki	Perempuan	
0-4	1.440.081	1.380.947	2.821.028
5-9	1.378.561	1.315.609	2.694.170
10-14	1.395.870	1.328.217	2.724.087
15-19	1.439.699	1.353.655	2.793.354
20-24	1.460.294	1.378.228	2.838.522
25-29	1.488.880	1.407.702	2.896.582
30-34	1.474.221	1.407.917	2.882.138
35-39	1.448.588	1.402.027	2.850.615



Rentang Umur (tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki - Laki	Perempuan	
40-44	1.394.537	1.374.008	2.768.545
45-49	1.328.158	1.341.449	2.669.607
50-54	1.211.728	1.245.766	2.457.494
55-59	1.079.549	1.133.546	2.213.095
60-64	897.410	954.994	1.852.404
65-69	699.640	749.890	1.449.530
70-74	476.014	528.313	1.004.327
75+	424.512	552.273	976.785
Total	19.037.742	18.854.541	37.892.283

Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2025

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, kelompok pemuda didefinisikan sebagai penduduk berusia 15 hingga 29 tahun. Definisi ini sedikit berbeda dengan acuan nasional yang menetapkan rentang usia 16-30 tahun. Namun, untuk kepentingan penghitungan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Tahun 2025, disepakati menggunakan klasifikasi BPS guna menjamin konsistensi dan keandalan data.

Dengan patokan usia 15-29 tahun tersebut, jumlah pemuda di Jawa Tengah pada tahun 2024 mencapai 8.528.458 jiwa. Angka ini merepresentasikan 22,5% dari total populasi provinsi yang berjumlah 37.892.280 jiwa. Dengan kata lain, lebih dari seperlima penduduk Jawa Tengah merupakan generasi muda yang berada dalam fase produktif awal, menandakan potensi sumber daya manusia yang sangat besar untuk mendorong pembangunan daerah melalui kebijakan dan program yang tepat.

Kelompok usia inilah yang menjadi fokus pengukuran Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), karena merepresentasikan kapasitas, keterlibatan, serta potensi generasi muda dalam berbagai dimensi pembangunan, baik sosial, ekonomi, maupun budaya.

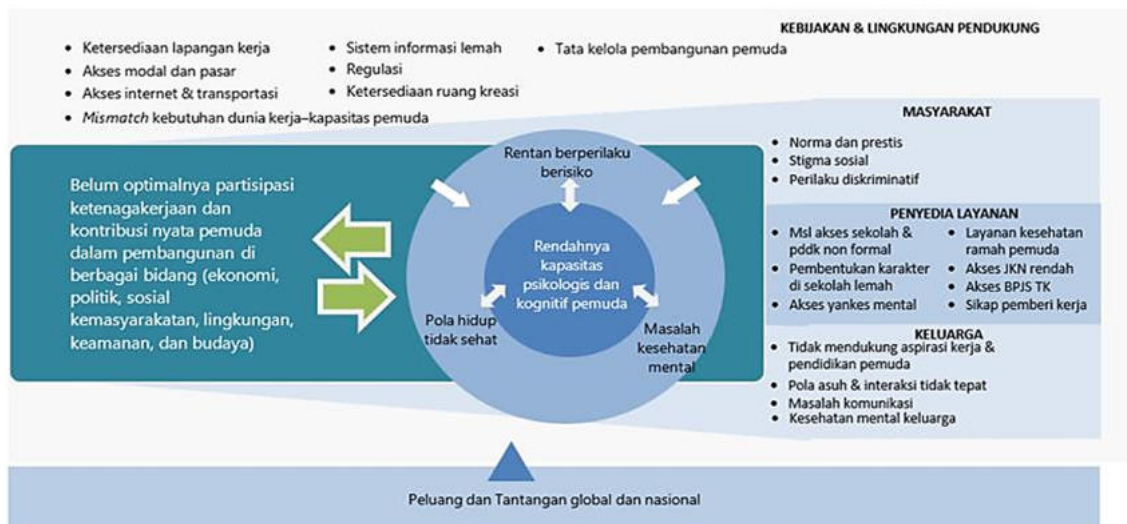
3.2.3 Isu Strategis Kepemudaan Jawa Tengah

Berdasarkan Studi Pendahuluan RPJPN 2025–2045 Bidang Kepemudaan, kondisi pemuda Indonesia saat ini masih belum sesuai



dengan harapan. Secara umum, kapasitas individu pemuda relatif rendah dan masih menghadapi berbagai hambatan dalam proses pengembangan diri. Kualitas kesehatan pemuda pun perlu mendapat perhatian, mengingat masih tingginya kerentanan terhadap perilaku berisiko seperti merokok, penyalahgunaan narkoba, dan keterlibatan dalam tindakan kriminal.

Dalam aspek partisipasi, keterlibatan pemuda dalam dunia kerja maupun kegiatan pembangunan belum optimal. Hal ini tampak dari masih tingginya angka pengangguran pemuda serta rendahnya peran mereka dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, termasuk dalam organisasi kepemudaan di lingkungan tempat tinggal.



Sumber: Studi Pendahuluan RPJPN 2025 – 2045

Gambar 3.7 Kerangka Pikir Konseptual dan Pemetaan Persoalan Pembangunan Pemuda

Pemuda sendiri merupakan aset penting bangsa dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Karena itu, berbagai persoalan dan isu kepemudaan perlu diintegrasikan ke dalam arah pembangunan jangka menengah nasional. Dalam penyusunan rencana pembangunan, pemuda menjadi bagian dari Prioritas Nasional 4, yaitu penguatan pembangunan sumber daya manusia, sains, kesehatan, olahraga, kesetaraan gender, serta peningkatan peran perempuan, pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan penyandang disabilitas. Namun, realisasi tujuan tersebut masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan, antara lain:



1. Partisipasi pendidikan tinggi yang masih rendah, khususnya di kelompok 20% penduduk termiskin (17,51%).
2. Kualitas lulusan pendidikan tinggi belum memadai, tercermin dari:
3. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan perguruan tinggi sebesar 9,29%.
4. 2,83% lulusan perguruan tinggi bekerja di bidang keterampilan rendah.
5. Proporsi penduduk usia ≥ 15 tahun dengan pendidikan tinggi masih rendah (10,51% pada 2023).
6. Angka perkawinan usia anak masih tinggi, dengan 6,92% perempuan usia 20–24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun.
7. Nilai Indeks Pembangunan Pemuda belum optimal, ditandai tingginya pemuda NEET (25,80%).
8. Produktivitas tenaga kerja rendah akibat dominasi pekerja berpendidikan SMP/MTs ke bawah (52,32%).
9. Keaktifan berolahraga masih rendah (9,04% penduduk usia > 10 tahun berolahraga minimal 3 kali/150 menit per minggu).
10. Budaya olahraga juga belum berkembang, dengan hanya 25,92% penduduk usia > 10 tahun berolahraga dalam satu minggu terakhir.

Kondisi-kondisi tersebut menegaskan bahwa peningkatan kapasitas dan partisipasi pemuda harus menjadi prioritas agar mereka dapat memainkan peran strategis dalam pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Di tingkat daerah, isu kepemudaan juga menjadi perhatian penting di Provinsi Jawa Tengah. Pemuda dipandang sebagai pilar strategis untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menjadi unsur penting dalam pembangunan yang berorientasi pada “Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif.”

Pembangunan kualitas hidup pemuda di Jawa Tengah dapat ditinjau melalui capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang mencakup lima domain utama: pendidikan; kesehatan dan kesejahteraan; kesempatan kerja; partisipasi dan kepemimpinan; serta gender dan



diskriminasi. Pada 2023, IPP Jawa Tengah mencapai 55,50, meningkat dari 53,83 pada 2022, namun masih berada di bawah rata-rata nasional (56,33).

Peningkatan IPP terutama didorong oleh kenaikan 5 poin pada domain kesehatan dan kesejahteraan. Domain partisipasi dan kepemimpinan juga tumbuh signifikan dari 43,33 pada 2022 menjadi 46,66 pada 2023. Sebaliknya, domain pendidikan, kesempatan kerja, serta gender dan diskriminasi mengalami stagnasi sehingga memerlukan perhatian lebih serius dari pemerintah daerah.

Dibandingkan capaian nasional, IPP Jawa Tengah 2023 menunjukkan variasi antar-domain. Nilai kesehatan dan kesejahteraan (62,5) masih di bawah nasional (70). Sebaliknya, partisipasi dan kepemimpinan lebih tinggi (46,67) dibandingkan rata-rata nasional (43,33). Domain pendidikan, kesempatan kerja, serta gender dan diskriminasi berada pada level yang sebanding dengan nasional. Secara keseluruhan, meskipun ada perbaikan pada beberapa aspek, pemerintah daerah perlu memperkuat strategi pembangunan kepemudaan agar seluruh domain IPP tumbuh secara proporsional dan mendukung terciptanya pembangunan yang inklusif di Jawa Tengah.

Berdasarkan identifikasi potensi dan permasalahan kepemudaan di Jawa Tengah, beberapa isu strategis yang perlu menjadi fokus adalah:

1. Penguatan kerja sama lintas sektor dalam penyediaan data kepemudaan di tingkat kabupaten/kota.
2. Penguatan kebijakan pemerintah daerah, baik melalui penyusunan regulasi maupun rencana aksi pembangunan kepemudaan.
3. Peningkatan peran organisasi kepemudaan sebagai wadah pengembangan kapasitas pemuda.
4. Pendorongan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik, termasuk dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.
5. Pemberdayaan pemuda untuk menekan pengangguran melalui kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia pendidikan.





4 CAPAIAN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA (IPP) PROVINSI JAWA TENGAH 2025

Capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 merupakan hasil pengukuran yang bersumber dari kinerja berbagai indikator dalam lima domain utama yang membentuk struktur IPP. Sebagai salah satu instrumen evaluasi pembangunan kepemudaan pada tingkat nasional maupun daerah, IPP berperan penting dalam menggambarkan sejauh mana kualitas hidup, kapasitas, dan peluang pemuda telah berkembang di berbagai aspek kehidupan.

Melalui IPP, dapat diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kontribusi berbagai faktor yang memengaruhi kondisi kepemudaan, mulai dari kemajuan pendidikan formal maupun nonformal, derajat kesehatan dan kesejahteraan pemuda, kesiapan mereka memasuki dunia kerja, keterlibatan dalam kehidupan sosial dan kepemimpinan, hingga tingkat inklusivitas dan kesetaraan gender dalam berbagai sektor pembangunan. Pemahaman yang mendalam terhadap indikator-indikator tersebut sangat krusial untuk mendukung penyusunan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan pemuda, sekaligus memastikan arah pembangunan yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di Jawa Tengah.

Pada bagian ini akan disajikan uraian mengenai capaian seluruh indikator penyusun IPP Jawa Tengah Tahun 2025. Sebanyak 16 indikator yang tersebar dalam lima domain memiliki fungsi strategis dalam memberikan gambaran rinci mengenai kondisi pemuda pada setiap aspek. Selain menunjukkan kinerja masing-masing domain, analisis indikator ini juga memperlihatkan kontribusi relatifnya terhadap capaian IPP Jawa Tengah secara keseluruhan. Dengan



demikian, penjelasan ini diharapkan dapat menjadi dasar penting dalam merumuskan strategi intervensi pembangunan kepemudaan yang lebih terarah dan berbasis bukti guna mendorong peningkatan kualitas pemuda Jawa Tengah secara berkelanjutan.

4.1 DOMAIN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Berdasarkan *Metodologi Peninjauan Ulang Perhitungan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)* yang ditetapkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), setiap indikator dalam IPP diberikan bobot, batas minimum, dan batas maksimum untuk menjamin standarisasi perhitungan antarwilayah. Ketentuan metodologis tersebut digunakan untuk



melakukan normalisasi sehingga skor setiap indikator dapat dibandingkan secara proporsional. Dalam kerangka metodologi ini, Domain Pendidikan dan Pelatihan diposisikan sebagai salah satu domain fundamental dalam IPP karena mencerminkan kapasitas dasar pemuda untuk berpartisipasi secara produktif dalam pembangunan ekonomi, sosial, maupun teknologi. Domain ini menilai sejauh mana pemuda memiliki modal pendidikan, kompetensi teknis, serta kemampuan adaptasi terhadap dinamika transformasi digital.

Indikator pertama dalam domain ini adalah persentase pemuda yang menerima pelatihan bersertifikat, dengan bobot 0,33 dan batas maksimum sebesar 40,89. Hasil penghitungan menunjukkan capaian 17,59. Dibandingkan dengan batas maksimum indikator, capaian ini mengindikasikan bahwa akses pemuda Jawa Tengah terhadap pelatihan bersertifikat masih perlu diperkuat. Rendahnya capaian dapat disebabkan oleh beberapa faktor struktural, seperti keterbatasan ketersediaan lembaga pelatihan terakreditasi, ketimpangan akses informasi, atau kemampuan finansial pemuda untuk mengikuti pelatihan profesional. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun kebutuhan keterampilan kerja semakin meningkat, kesempatan untuk memperoleh pelatihan



formal belum terdistribusi secara merata. Hal ini menimbulkan urgensi bagi pemerintah daerah untuk memperluas program fasilitasi pelatihan, memperbanyak skema kemitraan industri, serta meningkatkan jangkauan pelatihan berbasis kompetensi yang terstandardisasi.

Indikator kedua, yaitu persentase pemuda yang menamatkan pendidikan SMA/ sederajat atau lebih tinggi, memiliki bobot sebesar 0,34 dengan batas maksimum 92,95. Capaian Jawa Tengah pada indikator ini adalah 43,82. Angka tersebut menggambarkan bahwa tingkat pendidikan menengah pemuda menunjukkan tren positif, yang menandakan keberhasilan program wajib belajar dan perluasan akses pendidikan menengah. Namun demikian, nilai capaian tersebut juga menunjukkan bahwa masih terdapat ruang perbaikan, terutama terkait kesenjangan akses pendidikan antarwilayah, disparitas berdasarkan kondisi ekonomi keluarga, serta motivasi melanjutkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi. Arah kebijakan pada dimensi ini perlu difokuskan pada peningkatan angka melanjutkan sekolah di kelompok rentan, penguatan beasiswa pendidikan menengah, serta percepatan penyediaan sarana-prasarana pendidikan yang setara.

Indikator ketiga menilai persentase pemuda yang memiliki keterampilan TIK, dengan bobot 0,33 dan batas maksimum 100. Capaian yang diperoleh Jawa Tengah adalah 98,55, yang merupakan nilai sangat tinggi dan hampir mendekati batas maksimum. Capaian ini menandakan bahwa pemuda Jawa Tengah telah memiliki adaptabilitas digital yang kuat, baik dalam penggunaan perangkat TIK maupun pemanfaatan teknologi dalam aktivitas belajar, bekerja, maupun interaksi sosial. Hal ini juga menunjukkan keberhasilan penetrasi internet, perkembangan ekosistem digital, serta meningkatnya budaya penggunaan teknologi di kalangan pemuda. Tingginya capaian pada indikator ini dapat dijadikan landasan bagi penguatan literasi digital tingkat lanjut, seperti keterampilan data, keamanan digital, dan pemanfaatan teknologi untuk wirausaha muda.

Berdasarkan hasil penilaian terstandardisasi dengan mempertimbangkan bobot tiap indikator, skor keseluruhan Domain Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah adalah **62,75**. Nilai ini mengindikasikan bahwa kapasitas pendidikan dan pelatihan pemuda berada pada kategori *cukup berkembang*, dengan



kekuatan dominan pada kompetensi TIK. Namun demikian, capaian yang relatif rendah pada indikator pelatihan bersertifikat menunjukkan adanya kebutuhan intervensi kebijakan yang lebih strategis, terutama pada aspek peningkatan kompetensi vokasi pemuda yang relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Untuk itu, pemerintah daerah perlu mengadopsi pendekatan pengembangan kapasitas pemuda yang lebih komprehensif, mencakup perluasan akses pelatihan berbasis kompetensi, pemberdayaan lembaga pelatihan lokal, kolaborasi lintas-sektor, dan penyelarasan program pelatihan dengan kebutuhan industri di Jawa Tengah.

Secara keseluruhan, pemetaan capaian Domain Pendidikan dan Pelatihan ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi peningkatan kualitas sumber daya pemuda. Dengan memperkuat akses pelatihan tersertifikasi, melanjutkan percepatan pemerataan pendidikan menengah, dan meningkatkan kompetensi digital lanjutan, maka pembangunan kepemudaan di Jawa Tengah dapat diarahkan pada peningkatan produktivitas, daya saing, dan kemandirian pemuda dalam menghadapi transformasi sosial dan ekonomi di masa depan.

Tabel 4.1 Ringkasan Domain Pendidikan dan Pelatihan

Indikator	Capaian Indikator	Kondisi Capaian	Keterangan / Tindak Lanjut
Persentase pemuda mendapatkan pelatihan bersertifikat	17.59	Cenderung rendah dan belum merata	Perluasan akses pelatihan vokasi dan digital, peningkatan jumlah lembaga pelatihan bersertifikat, serta penyediaan subsidi pelatihan untuk pemuda dari keluarga berpenghasilan rendah.
Persentase pemuda berijazah SMA/ sederajat atau lebih tinggi	43.82	Moderate namun masih tertinggal dari potensi maksimum	Penguatan akses pendidikan menengah, pencegahan putus sekolah, perluasan beasiswa, dan program afirmasi untuk wilayah terpencil dan pemuda berisiko.
Persentase pemuda dengan keterampilan TIK	98.55	Sangat tinggi dan mendekati kondisi ideal	Pertahankan kapasitas TIK pemuda dengan memperluas program literasi digital lanjutan, pelatihan coding, kewirausahaan digital, serta sertifikasi skilling-up berbasis kebutuhan industri.
Skor Domain Pendidikan dan Pelatihan	62.75	Capaian kategori menengah-naik	Meningkatkan kualitas pelatihan, memperluas akses pendidikan menengah, dan mempertahankan keunggulan literasi TIK untuk



Indikator	Capaian Indikator	Kondisi Capaian	Keterangan / Tindak Lanjut
			mendorong peningkatan skor domain di periode berikutnya.

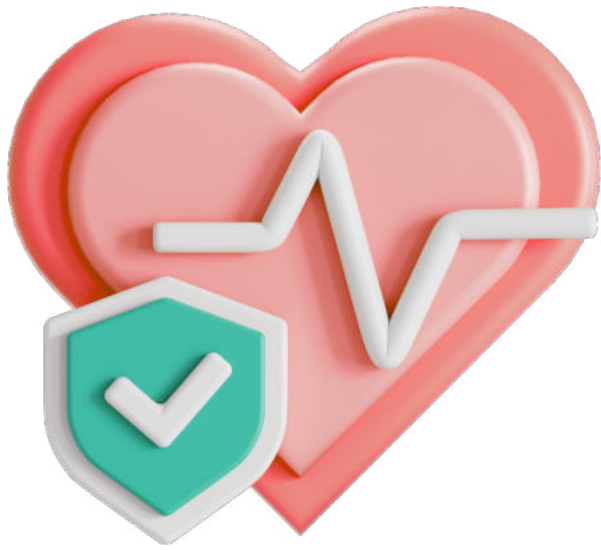
Sumber: Data Diolah, 2025

Capaian Domain Pendidikan dan Pelatihan menunjukkan kondisi yang beragam antarindikator, menggambarkan bahwa pemuda di Jawa Tengah telah memiliki potensi kuat namun masih menghadapi sejumlah kesenjangan dalam akses dan pemerataan layanan pendidikan serta pelatihan. Persentase pemuda yang memiliki keterampilan TIK mencapai 98,55 persen, menandakan kondisi yang hampir ideal dan memperlihatkan bahwa literasi digital sudah menjadi kompetensi dasar yang dikuasai oleh mayoritas pemuda. Keberhasilan ini perlu dijaga melalui perluasan program literasi digital lanjutan, pelatihan teknologi terapan seperti coding dan pemrograman, hingga sertifikasi berbasis kebutuhan industri digital masa kini. Di sisi lain, persentase pemuda berijazah SMA/ sederajat atau lebih tinggi tercatat 43,82 persen—kategori moderat namun masih jauh dari potensi optimal. Hal ini menuntut adanya penguatan akses pendidikan menengah, program pencegahan putus sekolah, serta perluasan skema beasiswa dan afirmasi bagi pemuda dari wilayah terpencil atau kelompok berisiko.



4.2 DOMAIN KESEHATAN

Domain kedua dari IPP adalah Domain Kesehatan. Berdasarkan Metodologi Peninjauan Ulang Perhitungan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, setiap indikator dalam domain kesehatan diberikan bobot serta batas minimum dan maksimum untuk memastikan proses



normalisasi nilai berlangsung secara terstandar dan objektif. Pentingnya pengukuran aspek kesehatan bagi pemuda tidak hanya terletak pada fungsinya sebagai indikator ketahanan fisik, tetapi juga sebagai prasyarat utama bagi produktivitas, partisipasi sosial, dan kesiapan pemuda dalam menghadapi dinamika pembangunan ekonomi. Kesehatan merupakan fondasi bagi tercapainya bonus demografi yang berkualitas; oleh karena itu, mengukur kondisi kesehatan pemuda dalam IPP menjadi penting untuk menilai risiko, memonitor tren perilaku kesehatan, dan merumuskan kebijakan intervensi yang lebih tepat sasaran. Domain Kesehatan dalam IPP secara khusus dirancang untuk menangkap gambaran komprehensif mengenai derajat kesehatan pemuda melalui indikator risiko penyakit, perilaku hidup sehat, dan isu-isu kesehatan reproduksi yang berpengaruh terhadap kualitas hidup jangka panjang.

Indikator pertama, yaitu angka kesakitan pemuda, memiliki bobot 0,26 dengan batas minimum 60,39 dan batas maksimum 0. Capaian aktual sebesar 8,48 menunjukkan tingkat kesakitan yang relatif rendah, namun secara metodologis, nilai ini perlu dibaca dalam konteks pembalikan skala karena indikator ini bersifat negatif (semakin tinggi nilai kesakitan, semakin buruk kondisi pemuda). Tingkat kesakitan yang rendah memberikan sinyal positif sekaligus menunjukkan bahwa pemuda Jawa Tengah secara umum mampu mempertahankan kondisi kesehatan fisik yang cukup stabil. Namun demikian, disparitas antarwilayah tetap memungkinkan, terutama di daerah dengan akses layanan kesehatan yang terbatas. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah



daerah untuk terus memastikan ketersediaan layanan preventif dan promotif yang merata di seluruh wilayah.

Indikator kedua adalah persentase pemuda yang merokok, dengan bobot 0,23, batas minimum 53,18, dan batas maksimum 3,63. Capaian aktual sebesar 27,41 menunjukkan bahwa perilaku merokok masih cukup tinggi dan menjadi tantangan serius dalam peningkatan kesehatan pemuda. Perilaku merokok pada usia muda merupakan isu yang berdampak jangka panjang karena dapat menurunkan kualitas kesehatan fisik, meningkatkan risiko penyakit kronis, dan mengurangi produktivitas. Kondisi ini menandakan perlunya penguatan kebijakan pengendalian tembakau berbasis pemuda, peningkatan edukasi kesehatan melalui institusi pendidikan, serta strategi komunikasi publik yang lebih agresif dalam menekan perilaku merokok.

Indikator ketiga, yaitu persentase pemuda yang berolahraga, memiliki bobot 0,26 dengan batas maksimum 70. Capaian 27,20 menunjukkan bahwa tingkat aktivitas fisik pemuda belum optimal. Dalam konteks pembangunan pemuda, partisipasi olahraga bukan hanya dikaitkan dengan aspek kesehatan fisik, tetapi juga dengan pembentukan karakter, penguatan integritas, peningkatan ketahanan mental, serta pengembangan gaya hidup aktif. Rendahnya capaian ini mengindikasikan adanya kebutuhan untuk memperluas penyediaan fasilitas olahraga, memperkuat kampanye pola hidup sehat, serta meningkatkan akses pemuda terhadap kegiatan olahraga berbasis komunitas.

Indikator terakhir adalah persentase remaja perempuan yang sedang hamil, dengan bobot 0,25, batas minimum 49,01, dan batas maksimum 0. Capaian aktual sebesar 49,01 menunjukkan tantangan signifikan terkait kesehatan reproduksi remaja. Kehamilan remaja merupakan indikator negatif yang mencerminkan kerentanan sosial, risiko kesehatan maternal, serta keterbatasan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi. Kondisi ini memiliki dampak jangka panjang terhadap masa depan remaja perempuan, termasuk peningkatan risiko putus sekolah dan terbatasnya peluang kerja di masa dewasa. Pemerintah daerah perlu memperkuat layanan konseling kesehatan reproduksi, memperluas pendidikan kesehatan seksual yang komprehensif, serta meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam mencegah perkawinan usia anak.



Secara keseluruhan, keempat indikator ini menggambarkan bahwa derajat kesehatan pemuda Jawa Tengah berada pada kondisi yang memerlukan intervensi strategis dan berkelanjutan. Meskipun terdapat indikator yang menunjukkan capaian positif seperti rendahnya angka kesakitan, tantangan serius tampak pada perilaku merokok dan kehamilan remaja yang membutuhkan respons kebijakan yang lebih komprehensif. Dengan memperkuat pendekatan promotif, preventif, serta memperluas akses layanan kesehatan ramah pemuda, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat meningkatkan kualitas kesehatan pemuda dan memastikan kontribusi mereka secara optimal dalam proses pembangunan daerah.

Tabel 4.2 Ringkasan Domain Kesehatan

Indikator	Capaian Indikator	Kondisi Capaian	Keterangan Tindak Lanjut
Angka kesakitan pemuda	60.39	Capaian relatif baik	Angka kesakitan masih perlu ditekan melalui peningkatan akses layanan kesehatan primer, skrining kesehatan pemuda, dan promosi perilaku hidup bersih.
Persentase pemuda yang merokok	53.18	Capaian masih kurang baik	Perlu penguatan regulasi kawasan tanpa rokok, kampanye anti-rokok, dan intervensi berhenti merokok bagi pemuda.
Persentase pemuda yang berolahraga	70.00	Capaian sangat baik	Menjaga keberlanjutan fasilitas olahraga dan meningkatkan event komunitas.
Persentase remaja perempuan yang sedang hamil	49.01	Capaian kurang baik	Perlu intervensi edukasi kesehatan reproduksi, penguatan pendampingan remaja, dan pengawasan perkawinan usia dini.
Skor Domain Kesehatan	44,41	Capaian kategori menengah	Kondisi kesehatan pemuda yang masih perlu intervensi strategis, terutama pada isu merokok dan kesehatan reproduksi. Penguatan edukasi kesehatan, peningkatan layanan ramah pemuda, kampanye pencegahan, serta kerja sama lintas sektor

Sumber: Data Diolah, 2025

Capaian pada Domain Kesehatan menunjukkan bahwa kondisi kesehatan pemuda di Jawa Tengah masih memerlukan perhatian serius, meskipun beberapa indikator telah berada pada level yang cukup baik. Angka kesakitan pemuda yang mencapai 60,39 mencerminkan kondisi yang relatif baik, namun tetap memerlukan upaya penurunan melalui peningkatan akses layanan kesehatan primer, program skrining kesehatan rutin, serta promosi perilaku hidup bersih dan



sehat. Di sisi lain, persentase pemuda yang berolahraga berada pada angka 70 persen, menunjukkan capaian yang sangat baik dan merupakan modal penting untuk meningkatkan kesehatan fisik serta daya tahan tubuh pemuda. Capaian ini perlu dipertahankan melalui penyediaan fasilitas olahraga yang berkelanjutan dan penyelenggaraan berbagai kegiatan komunitas yang meningkatkan minat dan partisipasi olahraga di kalangan pemuda.

Namun, dua indikator lainnya mengungkapkan tantangan signifikan yang perlu ditangani secara komprehensif. Persentase pemuda yang merokok masih mencapai 53,18 persen, mencerminkan kondisi yang kurang baik dan menunjukkan perlunya intervensi lebih tegas melalui penguatan regulasi kawasan tanpa rokok, kampanye anti-rokok yang lebih agresif, serta penyediaan layanan berhenti merokok yang terjangkau bagi pemuda. Selain itu, persentase remaja perempuan yang sedang hamil berada pada angka 49,01 persen, menandakan persoalan serius terkait kesehatan reproduksi dan potensi terjadinya perkawinan usia dini. Intervensi edukasi kesehatan reproduksi, pendampingan remaja, serta peningkatan pengawasan terhadap praktik perkawinan dini menjadi langkah krusial. Secara keseluruhan, skor Domain Kesehatan sebesar 44,41 yang berada pada kategori menengah menunjukkan bahwa masih dibutuhkan strategi terpadu melalui edukasi kesehatan, peningkatan layanan ramah pemuda, kampanye pencegahan, serta penguatan kolaborasi lintas sektor untuk memperbaiki kualitas kesehatan pemuda di Jawa Tengah.

4.3 DOMAIN KETENAGAKERJAAN LAYAK

Domain Ketenagakerjaan Layak dalam Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) memiliki peran penting karena mencerminkan kemampuan pemuda untuk memasuki pasar kerja secara produktif dan memperoleh pekerjaan yang aman, stabil, serta sesuai dengan standar kelayakan. Berdasarkan metodologi Peninjauan Ulang





Perhitungan IPP yang ditetapkan Kemenpora, setiap indikator dalam domain ini telah diberikan bobot, batas minimum, dan batas maksimum agar dapat distandarkan dan mencerminkan kondisi faktual secara lebih objektif. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap indikator tidak hanya dinilai berdasarkan nilai absolut, tetapi juga posisinya dalam rentang ideal yang ditetapkan secara nasional.

Dalam konteks daerah ini, dinamika ketenagakerjaan pemuda menggambarkan campuran antara kemajuan dan tantangan struktural. Persentase pemuda yang masuk kategori NEET (Not in Education, Employment, or Training) berada pada angka 21,37 persen, yang meskipun tidak berada pada kondisi terburuk, tetap menunjukkan adanya kelompok pemuda yang belum terserap dalam aktivitas produktif. Kondisi ini mengindikasikan perlunya intervensi dalam bentuk peningkatan keterampilan, perluasan lapangan kerja, dan akses pelatihan yang lebih inklusif.

Sementara itu, persentase pemuda pekerja tidak penuh tercatat sebesar 24,1 persen, yang menunjukkan bahwa sebagian pemuda bekerja dalam kondisi jam kerja kurang dari standar atau berstatus setengah menganggur. Indikator ini menjadi refleksi dari kualitas pekerjaan yang belum sepenuhnya layak, meskipun terjadi perbaikan dibandingkan batas maksimum yang digunakan sebagai acuan nasional. Tantangan ini menuntut strategi peningkatan produktivitas dan pembukaan kesempatan kerja formal yang lebih stabil.

Di sisi lain, kondisi lebih positif terlihat pada rasio kewirausahaan pemuda yang mencapai 1,1 persen dari batas maksimum 2,5. Meskipun belum ideal, capaian ini menunjukkan adanya potensi kewirausahaan yang mulai tumbuh di kalangan pemuda. Hal ini dapat menjadi modal penting dalam mendorong penciptaan lapangan kerja baru jika didukung dengan ekosistem kewirausahaan yang kuat, termasuk akses modal, pendampingan usaha, serta inkubasi bisnis.

Secara keseluruhan, indikator-indikator dalam domain Ketenagakerjaan Layak memperlihatkan bahwa meskipun terdapat potensi positif, tantangan struktural seperti NEET dan pekerja tidak penuh masih menahan pencapaian optimal. Intervensi kebijakan yang lebih terarah dan berbasis bukti akan sangat menentukan peningkatan nilai domain pada periode penilaian berikutnya.

**Tabel 4.3 Ringkasan Domain Ketenagakerjaan Layak**

Indikator	Capaian Indikator	Kondisi Capaian	Keterangan Tindak Lanjut
Persentase pemuda NEET	21.37	Moderate–tinggi (masih signifikan)	Perlu penguatan program pelatihan vokasi, perluasan lapangan kerja, dan pendampingan transisi sekolah–kerja.
Persentase pemuda pekerja tidak penuh	24.1	Relatif baik tetapi belum ideal	Penguatan penciptaan pekerjaan layak, peningkatan matching tenaga kerja, dan akses <i>upskilling</i> .
Rasio kewirausahaan pemuda	1.1	Cenderung baik dan berpotensi tumbuh	Perlu dukungan inkubasi usaha, akses permodalan, serta program pemuda wirausaha.
Skor Domain Ketenagakerjaan Layak	69,92	Capaian Kategori Menengah, perlu ditingkatkan.	Memperkuat program peningkatan kompetensi, perluasan kesempatan kerja layak, dan dukungan ekosistem kewirausahaan

Sumber: Data Diolah, 2025

Nilai Domain Ketenagakerjaan Layak sebesar 69,92 menunjukkan bahwa kondisi ketenagakerjaan pemuda berada pada kategori cukup baik dan relatif stabil dibandingkan berbagai domain lainnya dalam Indeks Pembangunan Pemuda. Berdasarkan metodologi Peninjauan Ulang IPP Kemenpora, nilai ini mencerminkan komposit standar yang diperoleh dari tiga indikator utama—NEET, pekerja tidak penuh, dan kewirausahaan pemuda—yang telah dinormalisasi menggunakan bobot, batas minimum, serta batas maksimum yang ditetapkan secara nasional. Dengan demikian, capaian ini tidak hanya menggambarkan angka mentah ketenagakerjaan, tetapi juga tingkat kemajuan relatif terhadap kondisi ideal pada tingkat nasional.

Secara substantif, nilai 69.92 dapat dipandang sebagai indikasi bahwa pemuda di daerah ini telah memiliki kondisi ketenagakerjaan yang lebih baik dibandingkan banyak wilayah lain, terutama dilihat dari rendahnya tingkat NEET dan terbatasnya proporsi pemuda yang bekerja tidak penuh. Capaian NEET sebesar 21,37 persen, meskipun masih menunjukkan adanya kelompok pemuda yang belum terserap dalam aktivitas produktif, sudah berada jauh lebih baik daripada batas minimum nasional yang dijadikan acuan. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pemuda telah terhubung dengan dunia kerja, pendidikan, atau pelatihan sehingga potensi kehilangan produktivitas dapat diminimalkan.

Indikator pekerja tidak penuh yang berada pada angka 24,1 persen juga memberikan kontribusi positif terhadap nilai domain karena masih berada jauh



dari batas terburuk (76 persen). Capaian ini mencerminkan bahwa mayoritas pemuda bekerja dalam kapasitas waktu yang memadai atau pada jenis pekerjaan yang memberikan stabilitas yang lebih baik. Dengan kata lain, kualitas pekerjaan pemuda mulai mengarah pada standar kelayakan meskipun masih terdapat ruang perbaikan pada sektor informal dan pekerjaan paruh waktu yang belum optimal

Sementara itu, indikator kewirausahaan pemuda dengan capaian 1,1 persen dari batas maksimum 2,5 persen menunjukkan tumbuhnya dinamika kewirausahaan di kalangan pemuda. Meskipun belum termasuk kategori sangat tinggi, angka ini memberi sinyal bahwa terdapat modal sosial dan ekonomi yang mulai berkembang, terutama di sektor-sektor UMKM dan usaha berbasis digital. Kontribusinya terhadap nilai domain cukup signifikan karena indikator ini menjadi refleksi kemampuan pemuda untuk menciptakan lapangan kerja secara mandiri.

Secara keseluruhan, nilai 69.92 memberikan justifikasi bahwa kondisi ketenagakerjaan pemuda berada pada jalur yang positif. Tantangan tetap ada, terutama dalam pengurangan pekerja tidak penuh serta peningkatan kapasitas dan kualitas kewirausahaan, namun secara umum struktur ketenagakerjaan pemuda sudah menunjukkan arah perbaikan yang kuat. Dengan memperkuat program peningkatan kompetensi, perluasan kesempatan kerja layak, dan dukungan ekosistem kewirausahaan, nilai domain ini berpotensi meningkat lebih tinggi.

4.4 DOMAIN PARTISIPASI DAN KEPEMIMPINAN

Domain Partisipasi dan Kepemimpinan merupakan salah satu aspek penting dalam Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) karena merefleksikan kapasitas pemuda untuk terlibat dalam aktivitas sosial, organisasi, dan pengambilan keputusan. Berdasarkan metodologi Peninjauan Ulang IPP oleh Kemenpora, setiap indikator dalam domain ini dinilai melalui bobot, batas minimum, dan batas maksimum yang dirancang untuk memberikan gambaran objektif mengenai kualitas partisipasi dan peran kepemimpinan pemuda dalam masyarakat. Penilaian ini tidak hanya mengukur





intensitas aktivisme sosial, tetapi juga tingkat representasi dan akses pemuda terhadap ruang-ruang strategis.

Capaian indikator menunjukkan struktur partisipasi pemuda yang kuat dan relatif stabil. Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan mencapai 76,77 persen, mendekati batas maksimum yang ditetapkan. Capaian ini menggambarkan bahwa sebagian besar pemuda memiliki kepedulian sosial dan keterlibatan dalam kegiatan komunitas, seperti karang taruna, kegiatan lingkungan, serta kegiatan sosial lainnya. Keterlibatan aktif ini memperlihatkan bahwa pemuda memiliki kesadaran akan pentingnya kontribusi sosial dan keterhubungan dengan lingkungan sekitarnya.

Selanjutnya, persentase pemuda yang aktif mengikuti organisasi berada pada angka 9,7 persen dari batas maksimum 18,5 persen. Meskipun tidak setinggi tingkat partisipasi sosial, capaian ini tetap menunjukkan bahwa terdapat kelompok pemuda yang memiliki komitmen terhadap organisasi formal, seperti organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, komunitas profesi, maupun organisasi sekolah dan kampus. Indikator ini menjadi penting karena keberadaan pemuda dalam organisasi formal merupakan jalur pembelajaran kepemimpinan, peningkatan kapasitas manajerial, serta pembentukan jejaring sosial yang lebih luas.

Indikator ketiga, yaitu persentase pemuda yang menduduki posisi manajerial, mencapai angka 4 persen, yang telah berada pada batas maksimum indikator. Hal ini menunjukkan bahwa pemuda telah memiliki representasi yang cukup baik dalam posisi-posisi strategis, baik di organisasi kepemudaan, struktur kemasyarakatan, maupun lembaga lainnya. Capaian ini memberikan kontribusi besar terhadap tingginya nilai domain karena mengindikasikan adanya kepercayaan publik dan kemampuan pemuda untuk memegang tanggung jawab kepemimpinan.

Secara keseluruhan, capaian nilai Domain Partisipasi dan Kepemimpinan sebesar 76.40 dapat dipandang sangat baik. Nilai ini menunjukkan bahwa pemuda memiliki tingkat partisipasi sosial yang tinggi, keterlibatan organisasi yang stabil, dan kemampuan kepemimpinan yang mulai diakui. Meskipun masih terdapat ruang perbaikan terutama pada peningkatan keterlibatan dalam organisasi formal, secara umum pemuda telah menunjukkan kapasitas partisipatif



dan kepemimpinan yang solid. Nilai ini dapat terus ditingkatkan melalui penguatan pendidikan kepemimpinan, pemberdayaan organisasi pemuda, dan perluasan akses pemuda terhadap ruang-ruang pengambilan keputusan.

Tabel 4.4 Ringkasan Domain Partisipasi dan Kepemimpinan

Indikator	Capaian Indikator	Kondisi Capaian	Keterangan / Tindak Lanjut
Persentase pemuda mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan	76.77	Sangat tinggi dan stabil	Pertahankan tingkat partisipasi sosial melalui penguatan kegiatan komunitas, program pemberdayaan di kelurahan/desa, dan insentif aktivitas karang taruna.
Persentase pemuda aktif mengikuti organisasi	9.7	Moderate, perlu peningkatan	Dorong revitalisasi organisasi pemuda, perluas akses pelatihan kepemimpinan, dan berikan fasilitasi kolaborasi organisasi lintas sektor.
Persentase pemuda yang menduduki posisi manajerial	4	Capaian maksimum, sangat baik	Perkuat pipeline kepemimpinan pemuda, perluas peluang pemuda dalam forum keputusan publik, dan dorong integrasi pemuda dalam struktur kelembagaan daerah.
Skor Domain Partisipasi dan Kepemimpinan	76,40	Capaian sangat baik	Peningkatan diperlukan pada aspek indikator peningkatan keaktifan keorganisasian

Sumber: Data Diolah, 2025

Capaian pada Domain Partisipasi dan Kepemimpinan menunjukkan bahwa pemuda di Provinsi Jawa Tengah telah memiliki keterlibatan sosial yang sangat kuat, terutama pada aspek partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dengan tingkat mencapai 76,77 persen. Kondisi ini mencerminkan bahwa ruang sosial di tingkat desa maupun kelurahan telah menjadi ekosistem penting bagi pemuda untuk berinteraksi, berkontribusi, dan membangun solidaritas sosial. Di sisi lain, persentase pemuda yang menduduki posisi manajerial berada pada angka 4 persen, yang menandakan capaian optimal dan mencerminkan keberhasilan dalam membuka ruang kepemimpinan bagi pemuda di berbagai sektor. Meski demikian, keberhasilan tersebut perlu diikuti dengan penguatan pipeline kepemimpinan serta perluasan peluang pemuda dalam proses pengambilan keputusan publik dan struktur kelembagaan daerah.

Namun, capaian pada indikator partisipasi dalam organisasi pemuda, yang berada pada angka 9,7 persen, menunjukkan bahwa masih terdapat ruang peningkatan yang cukup signifikan pada aspek keaktifan keorganisasian. Kondisi ini berimplikasi pada perlunya revitalisasi organisasi pemuda melalui penyediaan



akses pelatihan kepemimpinan, fasilitasi kolaborasi lintas sektor, serta penciptaan program yang lebih relevan dengan kebutuhan dan minat pemuda. Secara keseluruhan, skor Domain Partisipasi dan Kepemimpinan sebesar 76,40 mengindikasikan performa yang sangat baik, namun tetap memerlukan perhatian khusus pada aspek penguatan keorganisasian sebagai upaya untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutan capaian pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Tengah.

4.5 DOMAIN INKLUSIVITAS DAN KESETARAAN GENDER

Domain Inklusivitas dan Kesetaraan Gender dalam Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dirancang untuk mengukur sejauh mana pemuda, tanpa memandang jenis kelamin maupun kondisi fisik, memperoleh akses yang setara terhadap kesempatan kerja, aktivitas produktif, dan



perlindungan sosial. Berdasarkan metodologi Peninjauan Ulang IPP yang ditetapkan oleh Kemenpora, indikator dalam domain ini diberi bobot, batas minimum, dan batas maksimum untuk memastikan bahwa pengukuran dilakukan secara objektif berdasarkan rentang ideal yang berlaku secara nasional. Domain ini sangat penting karena isu kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, serta partisipasi penyandang disabilitas merupakan dimensi krusial dalam pembangunan inklusif.

Capaian indikator pertama, yaitu Rasio Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pemuda perempuan terhadap pemuda laki-laki, menunjukkan nilai 72,9 persen. Angka ini menggambarkan bahwa partisipasi pemuda perempuan dalam pasar kerja sudah relatif tinggi meskipun belum mencapai paritas penuh. Namun demikian, capaian ini sudah berada dalam rentang yang kuat dan menunjukkan adanya peningkatan akses dan peluang kerja bagi pemuda perempuan. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari meningkatnya partisipasi pendidikan



perempuan, perluasan peluang kewirausahaan, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perempuan bekerja.

Indikator kedua, yaitu persentase pemuda penyandang disabilitas yang bekerja, memiliki capaian 23,16 persen, yang setelah dinormalisasi berada pada posisi setara dengan skor 39,93. Meskipun belum berada pada tingkat ideal, capaian ini menunjukkan bahwa pemuda disabilitas telah memiliki akses terhadap pekerjaan, meskipun ruang peningkatan masih sangat besar. Hambatan berupa aksesibilitas, diskriminasi tidak langsung, serta keterbatasan program pelatihan vokasi menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang intervensi kebijakan yang lebih inklusif.

Indikator ketiga, yaitu persentase perkawinan anak, mencapai nilai 15,86 persen, yang ketika dinormalisasi menghasilkan skor 77,01—angka yang cukup tinggi dalam kerangka IPP karena batas maksimum indikator ini adalah kondisi terburuk (68,99). Capaian ini menandakan adanya penurunan kejadian perkawinan anak di daerah ini, suatu kemajuan yang penting mengingat perkawinan anak berkaitan erat dengan kerentanan kesehatan, keterputusan pendidikan, dan rendahnya partisipasi ekonomi perempuan. Penurunan perkawinan anak dapat menjadi indikator keberhasilan kampanye perlindungan perempuan, peningkatan partisipasi sekolah, serta penegakan regulasi terkait usia minimal perkawinan.

Secara keseluruhan, ketiga indikator tersebut menunjukkan bahwa kondisi inklusivitas dan kesetaraan gender berada pada kondisi yang relatif baik, dengan kekuatan utama pada penurunan perkawinan anak dan peningkatan TPAK perempuan. Tantangan utama tetap berada pada indikator penyandang disabilitas yang bekerja, yang memerlukan intervensi lebih sistematis agar kesempatan kerja bagi pemuda disabilitas dapat meningkat signifikan.

Tabel Indikator Domain Inklusivitas dan Kesetaraan Gender

Indikator	Capaian Indikator	Kondisi Capaian	Tindak Lanjut Kebijakan
Rasio TPAK pemuda perempuan terhadap laki-laki	72.9	Baik dan mendekati paritas	Perluasan akses pekerjaan bagi perempuan, peningkatan layanan pelatihan kerja ramah perempuan, dan pencegahan diskriminasi gender di pasar kerja.



Indikator	Capaian Indikator	Kondisi Capaian	Tindak Lanjut Kebijakan
Persentase pemuda penyandang disabilitas yang bekerja	23.16	Masih rendah, perlu perhatian khusus	Penguatan pelatihan vokasi untuk disabilitas, penyediaan fasilitas kerja inklusif, dan insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan disabilitas.
Persentase perkawinan anak	15.86	Sangat baik, menunjukkan tren penurunan signifikan	Perlu mempertahankan upaya pencegahan perkawinan anak melalui edukasi keluarga, pemberdayaan perempuan, dan penegakan regulasi usia perkawinan.
Skor Domain Inklusivitas dan Kesetaraan Gender	62,68	Capaian Kategori Menengah, perlu ditingkatkan.	Memperkuat program terkait peningkatan Inklusivitas dan Kesetaraan Gender khususnya pada aspek pemuda penyandang disabilitas yang bekerja dan menurunkan Persentase perkawinan usia anak di kalangan remaja perempuan

Sumber: Data Diolah, 2025

Nilai Domain Inklusivitas dan Kesetaraan Gender sebesar 62,68 menunjukkan bahwa kondisi pembangunan pemuda di bidang inklusivitas gender berada pada kategori cukup baik, dengan capaian yang kuat pada beberapa indikator namun masih menghadapi tantangan struktural pada aspek tertentu. Angka ini merupakan hasil penilaian terstandar berdasarkan metodologi Peninjauan Ulang IPP Kemenpora, yang memberi bobot serta batas minimum dan maksimum pada setiap indikator untuk menilai tingkat kemajuan relatif terhadap kondisi ideal.

Indikator pertama, yaitu Rasio TPAK pemuda perempuan terhadap laki-laki dengan capaian 72,9 persen, menjadi salah satu kontributor penting terhadap skor positif domain ini. Angka tersebut menunjukkan bahwa pemuda perempuan memiliki partisipasi yang relatif tinggi dalam pasar kerja, mendekati tiga perempat tingkat partisipasi pemuda laki-laki. Capaian ini menggambarkan kemajuan penting dalam kesetaraan gender, terutama dari sisi akses terhadap pekerjaan dan kemandirian ekonomi. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan meningkatnya pendidikan perempuan dan semakin terbukanya peluang kerja di sektor formal dan digital.

Indikator kedua, yaitu persentase pemuda penyandang disabilitas yang bekerja, memiliki capaian relatif rendah pada angka 23,16 persen, yang setelah dinormalisasi menghasilkan skor 39,93. Kondisi ini memberikan penurunan



terhadap nilai domain secara keseluruhan karena mencerminkan masih terbatasnya keterlibatan penyandang disabilitas dalam aktivitas ekonomi produktif. Tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan aksesibilitas, hambatan fisik maupun sosial, minimnya pelatihan kerja yang inklusif, serta masih rendahnya peluang kerja ramah disabilitas. Indikator ini menjadi titik lemah yang perlu intervensi kebijakan lebih terarah untuk meningkatkan inklusivitas ketenagakerjaan.

Indikator ketiga, yaitu persentase perkawinan anak, memiliki capaian 15,86 persen dan menghasilkan skor normalisasi tinggi sebesar 77,01. Capaian ini mencerminkan penurunan kasus perkawinan anak yang cukup signifikan dibandingkan batas terburuk indikator. Keberhasilan ini menggambarkan efektivitas program pencegahan perkawinan anak, peningkatan partisipasi sekolah, kampanye perlindungan perempuan, serta peran aktif pemerintah daerah dan komunitas dalam memperkuat pemahaman akan risiko perkawinan usia dini.

Secara keseluruhan, nilai 62.68 mencerminkan bahwa upaya pembangunan yang mendorong kesetaraan gender dan inklusivitas pemuda sudah berjalan dengan arah yang tepat. Kekuatan utama terletak pada tingginya TPAK perempuan dan kemajuan dalam menurunkan perkawinan anak. Namun demikian, nilai domain masih tertahan oleh kondisi pemuda penyandang disabilitas yang bekerja, sehingga peningkatan kebijakan inklusif dalam ketenagakerjaan menjadi prioritas strategis.



5 ARAH KEBIJAKAN





BERDASARKAN CAPAIAN IPP

Capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 merupakan hasil pengukuran yang bersumber dari kinerja berbagai indikator dalam lima domain utama yang membentuk struktur IPP. Pendekatan ***Evidence-based policy*** menempatkan data kuantitatif—seperti capaian pada domain Pendidikan dan Pelatihan—sebagai fondasi utama untuk merumuskan arah kebijakan yang akurat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Angka-angka capaian tiap indikator tidak hanya menggambarkan kondisi riil pemuda saat ini, tetapi juga mengungkapkan pola, ketimpangan, dan potensi masalah struktural yang mungkin tidak terlihat melalui penilaian subjektif semata. Misalnya, rendahnya persentase pemuda yang mendapatkan pelatihan bersertifikat menunjukkan bahwa kapasitas upskilling belum merata, sementara tingginya keterampilan TIK justru menandakan adanya peluang besar yang bisa dioptimalkan. Dengan demikian, setiap deviasi antara capaian aktual dan nilai maksimum menjadi sinyal penting tentang area intervensi yang mendesak, sekaligus membuka ruang untuk inovasi program. Dalam kerangka perencanaan, data ini membantu pemerintah daerah menyusun prioritas berbasis urgensi dan dampak, merancang strategi yang terarah, serta menetapkan target kebijakan yang realistis namun progresif. Lebih dari itu, penggunaan data kuantitatif memungkinkan evaluasi yang objektif terhadap efektivitas program dari tahun ke tahun, sehingga siklus kebijakan menjadi adaptif: kebijakan dirumuskan berdasarkan data, diimplementasikan, lalu diukur kembali untuk perbaikan berkelanjutan. Oleh karena itu, angka-angka capaian tersebut bukan sekadar statistik, melainkan instrumen strategis untuk memastikan bahwa kebijakan kepemudaan benar-benar menjawab kebutuhan lapangan, mengurangi kesenjangan, dan mempercepat peningkatan kualitas hidup pemuda secara konsisten.



Selain itu, penggunaan data capaian indikator memungkinkan proses perumusan kebijakan bergerak dari sekadar asumsi menuju pendekatan yang lebih ilmiah. Setiap indikator memiliki bobot yang mencerminkan tingkat kepentingannya, sehingga hasil akhirnya menjadi representasi komprehensif dari kondisi pemuda dalam suatu domain. Ketika nilai domain menunjukkan capaian yang belum optimal, hal tersebut memberikan justifikasi kuat bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien dan tepat sasaran. Data ini juga membantu mengidentifikasi kelompok-kelompok pemuda yang rentan, seperti mereka yang tidak mendapatkan pelatihan, belum menyelesaikan jenjang pendidikan menengah, atau kurang memiliki keterampilan untuk memasuki pasar kerja modern. Dengan demikian, kebijakan yang dibentuk tidak hanya bersifat umum, tetapi dapat diarahkan pada intervensi khusus yang menjawab kebutuhan nyata kelompok sasaran tersebut.

Di sisi lain, data kuantitatif seperti ini memperkuat akuntabilitas publik dalam proses perencanaan pembangunan kepemudaan. Ketika pemerintah daerah menyusun kebijakan berdasarkan angka yang terukur, maka setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Data ini memberikan alat kontrol bagi publik untuk menilai apakah kebijakan yang diterapkan benar-benar berdampak dan memberikan perubahan yang signifikan. Selain itu, konsistensi penggunaan data dari tahun ke tahun memungkinkan pemerintah mengevaluasi efektivitas program, memperbaiki desain kebijakan, serta memastikan bahwa arah pembangunan pemuda tetap berada pada jalur yang tepat. Dengan demikian, angka-angka tersebut tidak hanya menggambarkan kondisi saat ini tetapi juga menjadi kompas strategis yang mengarahkan proses pembangunan jangka panjang yang lebih terukur, adil, dan berkelanjutan.

5.1 CAPAIAN IPP SEBAGAI DASAR MONEV TIM RAD

Hasil perhitungan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 menunjukkan gambaran yang cukup berimbang antara capaian positif dan tantangan strategis di berbagai aspek pembangunan kepemudaan. Pada Domain Pendidikan dan Pelatihan, Jawa Tengah memperoleh nilai 62,75, yang mengindikasikan bahwa kualitas kompetensi dasar dan keterampilan



pemuda berada pada level berkembang, meskipun masih memerlukan penguatan khusus pada indikator pelatihan bersertifikat dan perluasan akses peningkatan kapasitas. Capaian ini memperlihatkan bahwa investasi pada pendidikan formal, keterampilan digital, dan pelatihan vokasional telah memberikan hasil yang cukup baik, namun belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah.

Pada Domain Kesehatan, nilai yang diperoleh adalah 44,41, yang menjadi peringatan penting bahwa aspek kesehatan pemuda masih berada dalam kategori rentan. Nilai ini menggambarkan bahwa prevalensi perilaku berisiko seperti merokok masih tinggi, tingkat aktivitas fisik belum optimal, serta faktor kesehatan reproduksi—termasuk kehamilan remaja—masih menjadi persoalan signifikan. Capaian kesehatan yang rendah mengisyaratkan perlunya intervensi komprehensif berbasis pencegahan, kampanye perubahan perilaku, penguatan layanan kesehatan ramah pemuda, serta kolaborasi lintas OPD untuk menjawab akar-akar persoalan secara sistematis.

Sementara itu, Domain Ketenagakerjaan Layak mencatat nilai 69,92, menunjukkan bahwa kondisi ketenagakerjaan pemuda di Jawa Tengah cukup kuat, terutama dari sisi rendahnya tingkat NEET (Not in Employment, Education, or Training) dan tumbuhnya minat kewirausahaan di kalangan pemuda. Meskipun demikian, pekerjaan tidak penuh (underemployment) tetap menjadi isu yang perlu diatasi melalui penciptaan lapangan kerja yang lebih produktif, peningkatan kualitas pelatihan kerja, serta dukungan terhadap wirausaha muda melalui akses permodalan dan pendampingan yang lebih sistematis.

Pada Domain Partisipasi dan Kepemimpinan, capaian 76,40 menjadi salah satu nilai tertinggi dalam IPP 2025. Nilai ini mencerminkan tingginya keterlibatan pemuda Jawa Tengah dalam kegiatan sosial, organisasi, maupun kepemimpinan di tingkat komunitas. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pemuda memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dan penggerak pembangunan daerah, sehingga upaya fasilitasi partisipasi, leadership development, dan ekosistem organisasi kepemudaan perlu terus diperkuat agar partisipasi ini dapat berkonversi menjadi kapasitas kepemimpinan yang berkelanjutan.

Pada Domain Inklusivitas dan Kesenjangan Gender, Jawa Tengah meraih nilai 62,68, sebuah indikasi bahwa pengarusutamaan kesetaraan dan keberpihakan



terhadap kelompok pemuda rentan berada dalam tahap progresif namun belum optimal. Rasio TPAK perempuan terhadap laki-laki menunjukkan perbaikan, namun masih terdapat tantangan besar pada indikator pekerja penyandang disabilitas dan angka perkawinan anak. Domain ini menegaskan perlunya afirmasi kebijakan yang lebih intensif agar kelompok pemuda perempuan, pemuda disabilitas, dan kelompok rentan lainnya memperoleh kesempatan yang setara untuk berkembang.

Tabel 5.1 Nilai IPP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Domain	Indikator	Nilai Indikator	Nilai Domain
Pendidikan dan Pelatihan	Persentase pemuda mendapatkan pelatihan bersertifikat	17.59	62.75
	Persentase pemuda yang memiliki ijazah SMA/ sederajat atau lebih tinggi	43.82	
	Persentase pemuda dengan keterampilan TIK	98.55	
Kesehatan	Angka kesakitan pemuda	8.48	44.41
	Persentase pemuda yang merokok	27.41	
	Persentase pemuda yang berolahraga	27.2	
	Persentase remaja perempuan yang sedang hamil	49.01	
Ketenagakerjaan Layak	Persentase pemuda NEET	21.37	69.92
	Persentase pemuda pekerja tidak penuh	24.1	
	Rasio kewirausahaan pemuda	1.1	
Partisipasi dan kepemimpinan	Persentase pemuda mengikuti kegiatan sosmas	76.77	76.40
	Persentase pemuda aktif mengikuti organisasi	9.7	
	Persentase pemuda yang menduduki posisi manajerial	4	
Inklusivitas dan kesetaraan gender	Rasio TPAK pemuda perempuan terhadap laki-laki	72.9	62.68
	Persentase pemuda penyandang disabilitas yang bekerja	23.16	
	Persentase perkawinan anak	15.86	
NILAI IPP PROVINSI JAWA TENGAH 2025			63,23



Sumber: Data Diolah, 2025

Rentang total:

$0 - 100 = 100$ poin $\rightarrow$ dibagi 3 kelas $\rightarrow$ masing-masing interval 33,33 poin.

Dengan demikian kategori dapat ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 5.2 Pembagian Kelas Kategori Capaian IPP

Kategori	Rentang Nilai	Interpretasi Umum
Rendah	0.00 – 33.33	Kondisi pembangunan pemuda masih tertinggal, banyak indikator kunci berada pada tingkat kritis dan membutuhkan intervensi intensif.
Sedang	33.34 – 66.66	Kondisi pembangunan pemuda berada pada fase berkembang. Sebagian indikator telah menunjukkan kemajuan, tetapi masih ada sektor yang memerlukan peningkatan signifikan.
Tinggi	66.67 – 100.00	Kondisi pembangunan pemuda berada pada tingkat baik–sangat baik, ditandai dengan kinerja positif di sebagian besar indikator. Tantangan masih ada, tetapi sifatnya lebih pada penyempurnaan dan ekspansi program.

Sumber: Tim Penulis, 2025

Nilai IPP Jawa Tengah Tahun 2025 adalah sebesar **63,23**, sehingga jika dimasukkan ke dalam klasifikasi di atas:

1. **63,23 berada pada kategori “Sedang”**, karena berada dalam rentang 33,34 – 66,66.
2. Posisi ini menunjukkan bahwa pembangunan kepemudaan di Jawa Tengah telah berada dalam kondisi berkembang menuju matang, dengan sejumlah domain unggulan (misalnya partisipasi dan ketenagakerjaan), namun masih menghadapi tantangan fundamental terutama pada domain kesehatan dan inklusivitas.

Dengan nilai 63.23, Jawa Tengah berada di ambang batas atas kategori “Sedang”, atau dapat dikatakan *sedang menuju tinggi* (near-high category).

Artinya:

1. Secara umum, ekosistem pembangunan pemuda telah terbentuk dengan baik.
2. Namun, upaya percepatan (*acceleration*) masih diperlukan terutama pada indikator yang memiliki dampak struktural jangka panjang seperti kesehatan, inklusivitas gender, disabilitas, dan akses pelatihan.
3. Jika fokus intervensi diarahkan secara tepat pada domain-domain prioritas, Jawa Tengah berpotensi masuk ke kategori “Tinggi” dalam periode perencanaan berikutnya.



Secara keseluruhan, Nilai IPP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 mencapai **63,23**, menempatkan provinsi ini dalam kategori perkembangan kepemudaan yang cukup baik dengan sejumlah potensi unggulan, namun juga masih menyisakan ruang perbaikan di sektor-sektor kritis. Nilai komposit ini mencerminkan dinamika pembangunan pemuda yang kompleks dan multidimensional—di mana kekuatan dalam partisipasi, ketenagakerjaan, dan pendidikan perlu terus dijaga, sementara tantangan pada aspek kesehatan dan inklusivitas harus menjadi prioritas intervensi lintas sektor. Dengan memahami capaian ini secara menyeluruh, pemerintah provinsi memiliki dasar yang kuat untuk menyusun kebijakan, menetapkan prioritas, dan memperkuat koordinasi antar-OPD dalam mendorong kualitas hidup pemuda Jawa Tengah secara berkelanjutan.

Sebagaimana diketahui, pada tahun 2023 Disporapar Provinsi Jawa Tengah telah menyusun dan menetapkan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan sebagai pedoman strategis bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan kepemudaan. Dokumen RAD tersebut tidak hanya menjadi komitmen formal pemerintah daerah, tetapi juga merupakan kerangka kerja operasional yang mengatur bagaimana program, kegiatan, dan kolaborasi lintas sektor harus diwujudkan untuk meningkatkan kualitas hidup pemuda di berbagai domain. Dalam konteks ini, hasil Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)—yang diukur melalui serangkaian indikator objektif, terstandar, dan berbasis metodologi nasional—menjadi rujukan penting yang wajib ditindaklanjuti oleh tim monitoring dan evaluasi (Monev) pelayanan kepemudaan yang telah dibentuk berdasarkan mandat RAD. Setiap nilai domain yang dihasilkan oleh IPP memberikan gambaran faktual mengenai kondisi aktual pemuda Jawa Tengah, baik yang telah menunjukkan kemajuan maupun yang masih memerlukan intervensi serius. Dengan demikian, IPP bukan sekadar angka statistik, tetapi menjadi instrumen diagnostik yang menentukan arah kebijakan secara lebih presisi dan membantu tim Monev merumuskan langkah korektif, strategi percepatan, serta bentuk intervensi yang harus dilakukan.

Lebih jauh lagi, integrasi IPP ke dalam siklus implementasi RAD Pelayanan Kepemudaan memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan benar-benar berbasis kebutuhan nyata pemuda (needs-based) dan bertumpu pada bukti yang dapat



diverifikasi (evidence-based). Tim Monev memiliki peran sentral dalam membaca pola capaian, menilai efektivitas program yang telah berjalan, serta mengidentifikasi gap antara target pemerintah dengan realitas lapangan. Ketika sebuah domain menunjukkan nilai yang rendah—misalnya pada indikator pelatihan, kesehatan, atau inklusivitas—tim Monev dapat memberikan rekomendasi untuk penyesuaian kebijakan, penambahan program afirmatif, atau penyempurnaan sinergi antar-perangkat daerah. Sebaliknya, capaian tinggi pada domain tertentu juga harus dianalisis agar keberhasilan tersebut dapat direplikasi pada kabupaten/kota lain atau diperluas cakupannya. Dengan demikian, IPP dan RAD tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling menguatkan dalam menciptakan tata kelola pembangunan kepemudaan yang adaptif, responsif, dan berorientasi hasil.

Pada akhirnya, ketika RAD Pelayanan Kepemudaan dijalankan dengan mengacu pada IPP secara konsisten, Provinsi Jawa Tengah akan memiliki mekanisme pembangunan kepemudaan yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Tim Monev tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mengawal kualitas perencanaan dan memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan program. Dengan menggunakan IPP sebagai dasar evaluasi, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap investasi pada sektor kepemudaan menghasilkan dampak yang terukur, mengurangi kesenjangan antardomain, serta mendorong terciptanya generasi muda yang lebih sehat, produktif, inklusif, dan berdaya saing.

Hadirnya sejumlah indikator baru dalam IPP 2025 menuntut Tim RAD Pelayanan Kepemudaan Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan penyesuaian strategi dan arah kebijakan, karena indikator-indikator tersebut mencerminkan dimensi kompetensi, kesehatan, dan inklusivitas pemuda yang semakin relevan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi saat ini. Kelima indikator baru—yakni persentase pemuda yang mendapatkan pelatihan bersertifikat, persentase pemuda dengan keterampilan TIK, persentase pemuda yang berolahraga, persentase pemuda yang menduduki posisi manajerial, serta persentase pemuda penyandang disabilitas yang bekerja—memiliki implikasi langsung terhadap kualitas pembangunan kepemudaan dan menandai pergeseran paradigma



menuju pendekatan yang lebih progresif, responsif, dan transformatif dalam pembangunan sumber daya manusia muda.

Tabel 5.3 Indikator Baru dalam IPP 2025 dan Implikasi Pengembangan Pemuda di Jawa Tengah

Domain	Indikator Baru	Arah Pengembangan dan Implikasi bagi Pemuda Jawa Tengah
Pendidikan dan Pelatihan	Persentase pemuda mendapatkan pelatihan bersertifikat	Mendorong peningkatan kompetensi berbasis skills yang diakui secara formal; memperkuat daya saing pemuda di pasar kerja; memperluas kerja sama pelatihan dengan industri; mengurangi skill mismatch antara kebutuhan dunia kerja dan kapasitas pemuda.
Pendidikan dan Pelatihan	Persentase pemuda dengan keterampilan TIK	Menjadi fondasi bagi transformasi digital; memperluas partisipasi pemuda dalam ekonomi digital, gig economy, dan industri kreatif; mendorong perluasan pusat pelatihan digital serta program literasi TIK di seluruh kabupaten/kota.
Kesehatan	Persentase pemuda yang berolahraga	Menguatkan perilaku hidup sehat berbasis aktivitas fisik; mencegah risiko penyakit kronis; meningkatkan produktivitas; mendorong penyediaan fasilitas olahraga publik, komunitas olahraga pemuda, serta kampanye gaya hidup aktif.
Partisipasi dan Kepemimpinan	Persentase pemuda yang menduduki posisi manajerial	Memperluas peluang kepemimpinan strategis bagi pemuda; mendukung kaderisasi pemimpin muda; memerlukan program peningkatan kapasitas leadership, mentoring, dan akselerasi akses pemuda ke posisi pengambil keputusan di sektor publik maupun swasta.
Inklusivitas dan Kesetaraan Gender	Persentase pemuda penyandang disabilitas yang bekerja	Memperkuat agenda pembangunan inklusif; mendorong penciptaan lingkungan kerja yang ramah disabilitas; memastikan kesetaraan akses terhadap pelatihan, pekerjaan, dan perlindungan sosial; meningkatkan kebijakan afirmatif bagi pemuda disabilitas.

Indikator pemuda yang mendapatkan pelatihan bersertifikat menegaskan pentingnya penguatan kapasitas berbasis kompetensi, bukan sekadar pendidikan formal. Kehadiran indikator ini menunjukkan bahwa pemerintah kini mendorong peningkatan keterampilan praktis yang diakui secara resmi, sehingga pemuda dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja, mengakses pekerjaan yang lebih layak, serta memiliki peluang mobilitas ekonomi yang lebih besar. Bagi Jawa Tengah, indikator ini sangat relevan mengingat masih terdapat kesenjangan keterampilan (*skill gap*) antara permintaan industri dan kemampuan pemuda. Dengan demikian, kebijakan yang menekankan pengembangan sistem pelatihan,



kerja sama dengan lembaga sertifikasi, serta integrasi program vokasional perlu diperkuat dalam RAD.

Sementara itu, persentase pemuda dengan keterampilan TIK menjadi indikator yang krusial di era digital. Keterampilan digital tidak lagi sekadar pelengkap, melainkan menjadi kompetensi dasar dalam hampir seluruh sektor ekonomi dan layanan publik. Masuknya indikator ini mencerminkan kebutuhan untuk meningkatkan literasi digital, kesiapan teknologi, dan adaptasi pemuda terhadap industri berbasis data dan teknologi informasi. Bagi Jawa Tengah, indikator ini mengisyaratkan pentingnya perluasan akses pelatihan digital, pengembangan ekosistem digital skill center, serta dukungan bagi pemuda untuk memasuki sektor ekonomi digital dan *gig economy* yang berkembang pesat.

Indikator persentase pemuda yang berolahraga menempatkan kesehatan preventif sebagai fokus utama. Perubahan ini menunjukkan bahwa pengukuran kesehatan pemuda tidak lagi hanya berbasis risiko (*risk-based*), tetapi juga berbasis gaya hidup sehat (*health-promoting behaviour*). Bagi Jawa Tengah, indikator ini sangat penting mengingat kesehatan fisik pemuda memengaruhi produktivitas, kemampuan belajar, dan ketahanan mereka terhadap tekanan sosial maupun ekonomi. Hal ini menuntut kebijakan yang memperluas akses ruang olahraga, kegiatan *sport-community*, dan kampanye gaya hidup aktif.

Indikator pemuda yang menduduki posisi manajerial memperkenalkan dimensi kepemimpinan yang lebih substantif. Tidak hanya soal partisipasi dalam organisasi, tetapi juga kemampuan untuk mengambil keputusan strategis dan memimpin sebuah unit. Kehadiran indikator ini menuntut adanya intervensi pengembangan kepemimpinan lanjutan, program mentorship, inkubasi kepemimpinan muda, serta pemberian ruang bagi pemuda untuk mengakses posisi pengambil keputusan di institusi publik maupun swasta. Bagi Jawa Tengah, indikator ini memunculkan peluang memperkuat kaderisasi kepemimpinan muda pada level desa, komunitas, hingga lembaga formal.

Terakhir, masuknya indikator persentase pemuda penyandang disabilitas yang bekerja menandai komitmen kuat terhadap inklusivitas dan keadilan sosial. Indikator ini menekankan bahwa pembangunan kepemudaan harus menjangkau seluruh kelompok pemuda, termasuk mereka yang menghadapi hambatan fisik, sensorik, atau intelektual. Bagi Jawa Tengah, indikator ini menjadi dasar untuk



memperluas kebijakan afirmatif, membangun lingkungan kerja yang inklusif, serta memastikan pemuda disabilitas dapat mengakses pelatihan, kesempatan kerja, dan perlindungan sosial secara setara. Pendekatan ini sekaligus memperkuat agenda pembangunan inklusif dan memperkecil kesenjangan kesempatan antar kelompok pemuda.

Dengan demikian, indikator-indikator baru dalam IPP 2025 tidak hanya memperkaya kerangka pengukuran pembangunan kepemudaan, tetapi juga memberikan arah yang lebih jelas bagi Tim RAD untuk memperkuat program berbasis kompetensi, digitalisasi, kesehatan preventif, kepemimpinan strategis, dan inklusivitas bagi pemuda di seluruh Jawa Tengah.

5.2 KUADRAN PRIORITAS CAPAIAN INDIKATOR IPP 2025

Dalam menunjang proses peninjauan dan pemetaan intervensi program yang mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), Tim RAD Pelayanan Kepemudaan Jawa Tengah perlu mengkaji capaian setiap indikator secara sistematis melalui kerangka kuadran kategori capaian. Pendekatan kuadran ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi aktual pembangunan kepemudaan, sekaligus membantu membedakan indikator mana yang menunjukkan performa kuat dan indikator mana yang masih membutuhkan perhatian serius. Dengan membagi indikator ke dalam empat kelompok—berdasarkan kombinasi antara tingkat capaian dan urgensi pengembangan—Tim RAD dapat memastikan bahwa pengambilan keputusan tidak hanya berbasis persepsi, tetapi betul-betul mencerminkan kebutuhan nyata pemuda di lapangan.

Kuadran pertama berisi indikator dengan capaian tinggi namun tetap memerlukan prioritas pengembangan, karena indikator tersebut memiliki kontribusi strategis terhadap pembangunan jangka panjang. Pada sisi lain, indikator dalam kuadran kedua menggambarkan performa yang baik dan relatif stabil, sehingga intervensi kebijakannya cukup berfokus pada pemeliharaan dan penguatan yang proporsional. Analisis seperti ini membantu menghemat sumber daya dan memastikan bahwa kebijakan tidak mengarahkan perhatian secara berlebihan pada area yang sebenarnya sudah berjalan optimal. Sementara itu, kuadran ketiga merupakan ruang yang paling kritis karena berisi indikator



dengan capaian rendah namun memiliki urgensi tinggi untuk segera ditangani. Indikator dalam kuadran ini merupakan prioritas utama program intervensi dan perlu didukung melalui kebijakan afirmatif, kolaborasi lintas sektor, serta peningkatan kapasitas kelembagaan.

Adapun indikator yang masuk ke dalam kuadran keempat—yakni indikator dengan capaian rendah namun urgensi yang moderat—perlu terus dimonitor untuk mencegah terjadinya stagnasi atau penurunan kondisi di masa depan. Indikator dalam kelompok ini bukan berarti tidak penting, tetapi membutuhkan intervensi yang lebih bersifat bertahap, strategis, dan kontekstual. Dengan demikian, penggunaan kerangka kuadran ini memungkinkan Tim RAD untuk melihat keseluruhan spektrum pembangunan kepemudaan secara lebih terstruktur, memprioritaskan intervensi secara lebih efektif, dan memastikan bahwa setiap program yang dirumuskan benar-benar berkontribusi pada peningkatan IPP secara signifikan dan berkelanjutan.

Kuadran klasifikasi capaian indikator IPP Jawa Tengah berdasarkan *kinerja capaian* dan *tingkat prioritas intervensi*. Karena Anda tidak memberikan batas kuantitatif kuadran, saya menggunakan pendekatan analitis yang lazim dalam *policy performance quadrant*, yaitu:

1. Sumbu X: Tingkat Capaian (Rendah – Tinggi)
2. Sumbu Y: Tingkat Urgensi Pengembangan (Rendah – Tinggi)

Sehingga terbentuk empat kuadran:

1. Kuadran I – *High Achievement / High Priority (Pertahankan dan Ekspansi)*
2. Kuadran II – *High Achievement / Low Priority (Kinerja Kuat dan Stabil)*
3. Kuadran III – *Low Achievement / High Priority (Prioritas Intervensi Mendesak)*
4. Kuadran IV – *Low Achievement / Low Priority (Pemantauan Berkala)*

5.2.1 Kuadran I — *High Achievement / High Priority*

Indikator-indikator pada kategori ini memiliki performa kuat, namun tetap memerlukan perhatian strategis agar tidak mengalami stagnasi. Meskipun nilainya tinggi, indikator tersebut terkait erat dengan agenda pembangunan jangka panjang sehingga perlu terus diperkuat agar tidak mengalami penurunan atau regresi.



1. **Persentase pemuda dengan keterampilan TIK (98,55%)**

Angka ini menunjukkan bahwa hampir seluruh pemuda telah memiliki keterampilan dasar teknologi informasi dan komunikasi. Namun, tingginya capaian ini tidak boleh membuat upaya pengembangan berjalan pasif. Perkembangan teknologi yang sangat cepat menuntut peningkatan kompetensi digital yang lebih mendalam, seperti literasi data, keamanan siber, dan kemampuan menggunakan perangkat digital untuk produktivitas. Tanpa pembaruan keterampilan, pemuda berpotensi tertinggal dibandingkan kebutuhan industri yang terus berevolusi.

2. **Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial masyarakat (76,77%)**

Tingginya tingkat partisipasi sosial menunjukkan adanya modal sosial yang kuat dalam kelompok pemuda. Meski demikian, partisipasi tersebut perlu diarahkan agar lebih terstruktur, berkelanjutan, dan memiliki dampak nyata bagi pembangunan sosial. Penguatan strategi berupa fasilitasi kegiatan komunitas, peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan, dan penyediaan ruang partisipasi yang inklusif akan membantu memastikan bahwa keterlibatan sosial tidak hanya bersifat sporadis, tetapi benar-benar berkontribusi pada perubahan positif.

Secara keseluruhan, indikator dalam kuadran ini memerlukan penguatan berkelanjutan agar tetap relevan dengan dinamika perkembangan dan dapat menopang arah pembangunan pemuda dalam jangka panjang.

5.2.2 Kuadran II — *High Achievement / Low Priority*

Indikator-indikator yang menunjukkan performa tinggi pada saat ini cukup dijaga melalui mekanisme monitoring yang berkelanjutan.

1. **Persentase pemuda berijazah SMA/ sederajat atau lebih** berada pada angka 43,82 dari batas maksimum 92,95. Meskipun masih menyisakan ruang untuk peningkatan, capaian ini



tergolong tinggi dalam domain terkait dan mencerminkan akses pendidikan menengah yang relatif baik.

2. **Persentase perkawinan anak** memiliki skor 77,01 dalam skala Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Skor ini menandakan kondisi yang cukup baik, mengingat semakin rendah prevalensi perkawinan anak, semakin tinggi nilai skornya.
3. **Persentase pemuda pekerja tidak penuh** berada pada level 24,1, yang dikategorikan moderat dan menunjukkan stabilitas yang cukup konsisten di wilayah Jawa Tengah, sehingga tidak menimbulkan urgensi intervensi intensif.

Secara keseluruhan, ketiga indikator tersebut berada dalam situasi yang relatif aman dan stabil. Oleh karena itu, kebijakan yang diperlukan lebih bersifat pemeliharaan (*maintenance*), yaitu memastikan kondisi positif ini tetap terjaga melalui pemantauan rutin serta penyesuaian kebijakan bila terjadi indikasi perubahan signifikan.

5.2.3 Kuadran III — *Low Achievement / High Priority* (Prioritas Intervensi Mendesak)

Indikator yang capaian aktualnya rendah dan secara substantif sangat krusial bagi pembangunan kepemudaan. Inilah indikator yang membutuhkan intervensi paling agresif.

1. **Persentase pemuda yang mendapatkan pelatihan bersertifikat (17,59%)**

Angka yang masih rendah ini mengindikasikan adanya kesenjangan keterampilan, terutama dalam hal hard skill yang dibutuhkan dunia kerja. Kondisi ini menunjukkan perlunya perluasan akses, subsidi, dan integrasi pelatihan dengan industri untuk meningkatkan kompetensi pemuda secara signifikan.

2. **Persentase pemuda penyandang disabilitas yang bekerja (23,16%)**

Rendahnya tingkat partisipasi kerja pemuda penyandang disabilitas menegaskan perlunya kebijakan afirmatif,



penyediaan fasilitas aksesibilitas, serta pembangunan ekosistem kerja yang inklusif agar kesempatan kerja terbuka bagi seluruh pemuda tanpa hambatan struktural.

3. **Persentase pemuda pekerja informal/NEET (21,37%)**

Angka ini menunjukkan adanya risiko stagnasi ekonomi dan potensi pengangguran terselubung. Tingginya proporsi NEET mengharuskan intervensi berupa peningkatan akses pendidikan nonformal, program penempatan kerja, serta dukungan wirausaha bagi pemuda yang belum bekerja maupun tidak sedang menempuh pendidikan atau pelatihan.

4. **Angka kesakitan pemuda (8,48)**

Semakin tinggi nilai ini, semakin rendah kualitas kesehatan pemuda. Kondisi ini mencerminkan perlunya intervensi kesehatan preventif dan promotif, layanan kesehatan yang lebih mudah dijangkau, serta edukasi gaya hidup sehat untuk menekan risiko penyakit pada usia produktif.

5. **Persentase pemuda yang merokok (27,41%)**

Sebagai indikator risiko yang berdampak jangka panjang, tingginya angka perokok pemuda membutuhkan strategi pengendalian melalui kampanye anti-rokok, pengetatan regulasi konsumsi tembakau, dan penyediaan layanan berhenti merokok yang ramah pemuda.

Secara keseluruhan, indikator pada kuadran ini harus menjadi prioritas utama dalam perumusan kebijakan. Perbaikan yang dilakukan secara komprehensif dan sistematis akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan kepemudaan dalam jangka panjang.

5.2.4 Kuadran IV — *Low Achievement / Low Priority*

Indikator-indikator berikut memiliki capaian yang masih rendah, namun tingkat urgensi penanganannya tergolong moderat. Meskipun penting untuk diperhatikan, indikator dalam kuadran ini tidak memerlukan intervensi agresif dan lebih membutuhkan pemantauan rutin serta penguatan kebijakan secara bertahap.



1. **Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi (9,7%)**

Meskipun angkanya rendah, partisipasi dalam organisasi bersifat minat (interest-based) dan tidak berdampak langsung terhadap aspek ekonomi maupun kesehatan pemuda. Intervensi yang diperlukan lebih menekankan pada penyediaan ruang partisipasi yang menarik, penguatan kapasitas organisasi pemuda, serta mendorong budaya berorganisasi secara bertahap.

2. **Persentase pemuda yang berolahraga (27,2%)**

Aktivitas olahraga penting untuk kesehatan jangka panjang, namun urgensi kebijakan untuk peningkatannya dapat dilaksanakan secara progresif. Program penguatan gaya hidup aktif, penyediaan fasilitas olahraga yang terjangkau, dan kampanye kesehatan dapat dilakukan secara bertahap tanpa menimbulkan tekanan kebijakan yang besar.

Secara keseluruhan, indikator dalam kuadran ini memerlukan pengawasan dan perhatian berkelanjutan, tetapi tidak termasuk dalam prioritas intervensi utama. Pendekatan penguatan yang gradual sudah memadai untuk menjaga tren agar tidak menurun dan perlahan bergerak ke arah yang lebih positif.



Kuadran Klasifikasi Capaian Indikator IPP



Sumber: Tim Penulis, 2025

Gambar 5.1 Kuadran Klasifikasi Capaian Indikator IPP

Tabel 5.4 Ringkasan Kuadran Indikator IPP Jawa Tengah

Kuadran	Kategori	Indikator
I	High Achievement – High Priority	• Pemuda dengan keterampilan TIK • Pemuda mengikuti kegiatan sosial masyarakat
II	High Achievement – Low Priority	• Pemuda berijazah SMA/ sederajat • Perkawinan anak (skor tinggi → baik) • Pekerja tidak penuh
III	Low Achievement – High Priority (Kritis)	• Pelatihan bersertifikat • Pemuda disabilitas bekerja • NEET • Angka kesakitan pemuda • Pemuda merokok
IV	Low Achievement – Low Priority	• Pemuda aktif organisasi • Pemuda yang berolahraga



Sumber: Tim Penulis, 2025

5.3 MATRIKS ARAH KEBIJAKAN DAN IMPLIKASI

1. Domain Pendidikan & Pelatihan

Tabel 5.5 Matriks Arah Kebijakan – Intervensi – Implikasi Domain Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah

Komponen	Uraian
Arah Kebijakan	Meningkatkan kualitas keterampilan, tingkat pendidikan, dan akses pelatihan vokasional yang responsif terhadap kebutuhan industri dan ekonomi digital.
Intervensi Utama	• Perluasan program beasiswa, kursus vokasi, dan pelatihan berbasis permintaan pasar kerja (demand-driven training). • Sertifikasi kompetensi bagi pemuda usia 16–30 tahun. • Peningkatan kolaborasi SMK–BUMN/Swasta–BLK.
OPD Terkait	Disdikbud, Disnakertrans, Bappeda, Dinas Perindustrian & Perdagangan, Dinas Kominfo.
Implikasi Kebijakan	• Meningkatnya permintaan anggaran untuk pelatihan dan kemitraan industri. • Perlu adanya standarisasi modul pelatihan dan monitoring output lulusan. • Tantangan data sharing antarinstansi.

Sumber: Tim Penulis, 2025

2. Domain Kesehatan

Tabel 5.6 Matriks Arah Kebijakan – Intervensi – Implikasi Domain Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

Komponen	Uraian
Arah Kebijakan	Menguatkan layanan kesehatan pemuda, terutama kesehatan reproduksi, kesehatan mental, partisipasi hidup sehat, dan akses jaminan kesehatan.
Intervensi Utama	• Penguatan Puskesmas Ramah Pemuda dan layanan konseling kesehatan mental. • Kampanye kesehatan reproduksi dan pola hidup sehat. • Perluasan cakupan kepesertaan JKN bagi pemuda rentan.
OPD Terkait	Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas P3AKB, Bappeda.
Implikasi Kebijakan	• Kebutuhan pelatihan tenaga kesehatan untuk edukasi pemuda. • Munculnya kebutuhan data kesehatan berbasis usia yang lebih akurat. • Kebutuhan koordinasi lintas sektor untuk isu kesehatan mental.



Sumber: Tim Penulis, 2025

3. Domain Ketenagakerjaan yang Layak

Tabel 5.7 Matriks Arah Kebijakan – Intervensi – Implikasi Domain Ketenagakerjaan Layak Provinsi Jawa Tengah

Komponen	Uraian
Arah Kebijakan	Mendorong peningkatan serapan pemuda ke pasar kerja yang aman, layak, dan berkelanjutan, termasuk sektor wirausaha digital.
Intervensi Utama	• Inkubasi wirausaha muda, terutama ekonomi digital dan UMKM kreatif. • Perluasan program pemagangan industri dan penempatan tenaga kerja. • Fasilitasi akses permodalan melalui KUR, penjaminan kredit, dan startup grant.
OPD Terkait	Disnakertrans, Dinas Koperasi & UMKM, Dinas Perindustrian, Dinas Kominfo.
Implikasi Kebijakan	• Kebutuhan regulasi yang adaptif terhadap gig economy dan platform work. • Meningkatnya permintaan layanan permodalan dan pendampingan. • Perlu konsistensi kurikulum kewirausahaan di sekolah/komunitas.

Sumber: Tim Penulis, 2025

4. Domain Partisipasi dan Kepemimpinan

Tabel 5.8 Matriks Arah Kebijakan – Intervensi – Implikasi Domain Partisipasi dan Kepemimpinan Provinsi Jawa Tengah

Komponen	Uraian
Arah Kebijakan	Menguatkan kapasitas kepemimpinan, representasi, dan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan daerah.
Intervensi Utama	▪ Penguatan forum-forum pemuda tingkat desa/kelurahan. ▪ Pelatihan kepemimpinan pemuda berbasis civic engagement. ▪ Peningkatan partisipasi pemuda dalam musrenbang dan perencanaan daerah.
OPD Terkait	Dinas Kepemudaan & Olahraga, Bappeda, Dinas P3AKB, Kesbangpol.
Implikasi Kebijakan	▪ Perlu mekanisme penyelarasan program kepemudaan lintas organisasi. ▪ Peningkatan biaya fasilitasi event dan capacity building.



Komponen	Uraian
	Risiko fragmentasi organisasi jika tidak ada koordinasi yang kuat.

Sumber: Tim Penulis, 2025

5. Domain Inklusivitas dan Kesetaraan Gender

Tabel 5.9 Matriks Arah Kebijakan – Intervensi – Implikasi Domain Inklusivitas dan Kesetaraan Gender Provinsi Jawa Tengah

Komponen	Uraian
Arah Kebijakan	Menciptakan ruang yang aman, inklusif, dan setara bagi seluruh kelompok pemuda termasuk perempuan, difabel, dan kelompok rentan.
Intervensi Utama	- Program anti-kekerasan terhadap perempuan dan anak. - Fasilitas publik ramah difabel dalam kegiatan kepemudaan. - Peningkatan representasi perempuan dalam forum pengambilan keputusan.
OPD Terkait	Dinas P3AKB, Disdikbud, Dinas Sosial, Dinas Pemuda & Olahraga.
Implikasi Kebijakan	- Kebutuhan penyediaan fasilitas tambahan (aksesibilitas, keamanan). - Peningkatan kapasitas aparaturnya mengenai gender mainstreaming. - Risiko stagnasi jika tidak ada regulasi pendukung tingkat daerah.

Sumber: Tim Penulis, 2025



6 PENUTUP





Sebagai penutup dari keseluruhan proses telaah IPP Provinsi Jawa Tengah, penting untuk menegaskan bahwa hasil pengukuran indikator pembangunan kepemudaan yang disajikan dalam laporan ini harus dipahami sebagai data estimatif yang bersifat indikatif, bukan sebagai representasi final dari kondisi faktual di lapangan. IPP pada dasarnya merupakan indeks komposit yang dibangun dari berbagai sumber data resmi, baik survei sosial ekonomi, data sektoral, maupun informasi administratif lain yang kemudian diproses melalui serangkaian mekanisme standardisasi, normalisasi, pembobotan, dan agregasi. Proses metodologis yang panjang ini tentu memiliki konsekuensi bahwa setiap indikator membawa potensi bias pengukuran, variasi kualitas data antardaerah, serta perbedaan definisi teknis di tingkat operasional. Oleh karena itu, interpretasi hasil tidak dapat dilakukan secara sederhana atau tekstual semata; perlu kehati-hatian tinggi, pemahaman metodologis yang memadai, serta kesadaran bahwa data ini memberikan sinyal arah perubahan, bukan ukuran final yang dapat diambil tanpa proses verifikasi lanjutan.

Dalam merespons keterbatasan tersebut, para pengambil kebijakan dan Tim RAD Kepemudaan perlu memandang IPP sebagai instrumen analitis, yakni alat bantu untuk mengidentifikasi tren, mendeteksi masalah prioritas, dan merumuskan arah kebijakan yang lebih terarah. Penggunaan IPP sebagai rujukan tidak boleh bersifat mekanis atau hanya mengikuti peringkat numerik, melainkan harus dipadukan dengan informasi kontekstual lain seperti kajian kualitatif, data sektoral OPD, serta temuan dari proses monitoring dan evaluasi lapangan. Pendekatan triangulatif ini akan memperkuat validitas analisis sehingga kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab persoalan nyata pemuda, bukan sekadar menyesuaikan diri pada nilai-nilai indeks. Di sinilah pentingnya literasi data pada setiap pemangku kepentingan; kebijakan kepemudaan membutuhkan pembacaan yang sensitif, kritis, dan berbasis metodologi, terlebih karena isu-isu pemuda selalu bergerak cepat mengikuti dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi.

Selanjutnya, prinsip *continuous improvement* harus menjadi landasan setiap keputusan dan kebijakan yang diambil berdasarkan hasil IPP. Dalam dunia kebijakan publik modern, data bukanlah elemen statis, melainkan entitas dinamis yang selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakat. Oleh karena itu,



kebijakan yang baik bukanlah kebijakan yang menetapkan keputusan sekali untuk seluruh periode pembangunan, tetapi kebijakan yang secara konsisten menyesuaikan diri terhadap perubahan indikator, hasil evaluasi program, serta kebutuhan nyata pemuda yang terus berkembang. Dengan menjadikan IPP sebagai instrumen yang diperbarui secara berkala, daerah dapat melakukan perencanaan yang lebih presisi, responsif, dan adaptif. Siklus kebijakan yang demikian menjadi wujud nyata dari tata kelola modern di mana setiap kebijakan bukan sekadar dokumen, tetapi proses berkelanjutan yang selalu diperkuat oleh data dan evaluasi.

Dalam konteks Jawa Tengah, hasil pengukuran IPP perlu dipandang sebagai bagian dari upaya besar pemerintah provinsi dalam membangun arah kebijakan kepemudaan yang lebih terarah dan terukur. Sejak terbentuknya Dokumen RAD Pelayanan Kepemudaan pada tahun 2023, Disporapar Jawa Tengah telah menempatkan pembangunan kepemudaan sebagai isu strategis yang membutuhkan pengelolaan data, koordinasi lintas sektor, dan perencanaan yang matang. Hasil IPP terbaru menjadi referensi penting bagi Tim Monev Pelayanan Kepemudaan untuk mengidentifikasi gap, mengevaluasi efektivitas program, dan menyempurnakan rencana aksi lintas OPD. Proses peninjauan ini menjadi semakin relevan karena perubahan indikator pada IPP 2025 menandai adanya pergeseran paradigma dalam memaknai kualitas hidup pemuda, terutama terkait keterampilan digital, kesehatan preventif, kewirausahaan, dan inklusivitas. Jika seluruh hasil ini ditindaklanjuti melalui proses koordinasi yang kuat dan analisis yang mendalam, maka IPP dapat menjadi pendorong perbaikan tata kelola pelayanan kepemudaan yang sistematis dan berkelanjutan.

Pada saat yang sama, Disporapar Jawa Tengah memiliki tanggung jawab strategis untuk terus mendorong penguatan literasi pembangunan kepemudaan di tingkat Kabupaten/Kota. Upaya sosialisasi IPP tidak boleh difokuskan pada kompetisi antarwilayah atau sekadar mengejar kenaikan peringkat indeks, karena pendekatan tersebut berisiko menempatkan IPP sebagai alat perlombaan numerik tanpa memberi makna substantif terhadap perbaikan kondisi pemuda. Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa setiap daerah benar-benar memahami cara membaca indikator, pola capaian, serta urgensi intervensi berdasarkan bukti kuantitatif. Melalui proses pendampingan, pelatihan, dan



penguatan kapasitas teknis bagi OPD di kabupaten/kota, Disporapar dapat mendorong pemanfaatan IPP sebagai pondasi kebijakan berbasis bukti, sehingga keputusan yang dibuat di tingkat daerah tidak spekulatif, tetapi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan teknokratis.

Akhirnya, komitmen bersama untuk memanfaatkan IPP secara tepat akan menentukan arah pembangunan kepemudaan Jawa Tengah dalam beberapa tahun ke depan. Jika IPP dipahami secara metodologis, diinterpretasikan dengan hati-hati, dan dijadikan dasar untuk perbaikan kebijakan secara berkelanjutan, maka indeks ini dapat berfungsi sebagai navigator strategis dalam menciptakan ekosistem pembangunan pemuda yang lebih inklusif, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup generasi muda. Maka, keberhasilan pembangunan kepemudaan bukanlah semata-mata dinilai dari angka indeks, melainkan dari sejauh mana data tersebut digunakan untuk menghadirkan perubahan nyata dalam kehidupan pemuda, memperluas peluang mereka, meningkatkan kesejahteraan, serta memastikan bahwa kebijakan publik benar-benar berpihak pada kebutuhan generasi penerus Jawa Tengah.



DAFTAR PUSTAKA

- Clapp, J., & Sen, A. (1999). Development as Freedom. In *International Journal* (Vol. 55, Nomor 1, hal. 160). <https://doi.org/10.2307/40203469>
- Erikson, E. H. (1968). *Identity Youth and Crisis*. W. W. Norton.
- Ghasarian, C., Bourdieu, P., & Nice, R. (1995). Sociology in Question. In *Anthropological Quarterly* (Vol. 68, Nomor 1, hal. 67). <https://doi.org/10.2307/3317467>
- TOURAINÉ, A. (1985). An Introduction to the Study of Social Movements. *Social Research*, 52(4), 749–787. <http://www.jstor.org/stable/40970397>
- United Nation. (2015). *Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. United Nation; United Nations.
- Clapp, J., & Sen, A. (1999). Development as Freedom. In *International Journal* (Vol. 55, Nomor 1, hal. 160). <https://doi.org/10.2307/40203469>
- Erikson, E. H. (1968). *Identity Youth and Crisis*. W. W. Norton.
- Ghasarian, C., Bourdieu, P., & Nice, R. (1995). Sociology in Question. In *Anthropological Quarterly* (Vol. 68, Nomor 1, hal. 67). <https://doi.org/10.2307/3317467>
- TOURAINÉ, A. (1985). An Introduction to the Study of Social Movements. *Social Research*, 52(4), 749–787. <http://www.jstor.org/stable/40970397>
- United Nation. (2015). *Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. United Nation; United Nations.